

GERAKAN SOSIAL DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN

*(Study Historis Gerakan Sosial Masyarakat Kampung Code, Kelurahan Kota Baru,
Gondokusuman, Kota Yogyakarta dalam Menghadapi Kebijakan Pemerintah Kota
Yogyakarta tahun 1983)*



oleh

YOHANES DIDIMUS SYUKUR

18520054

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

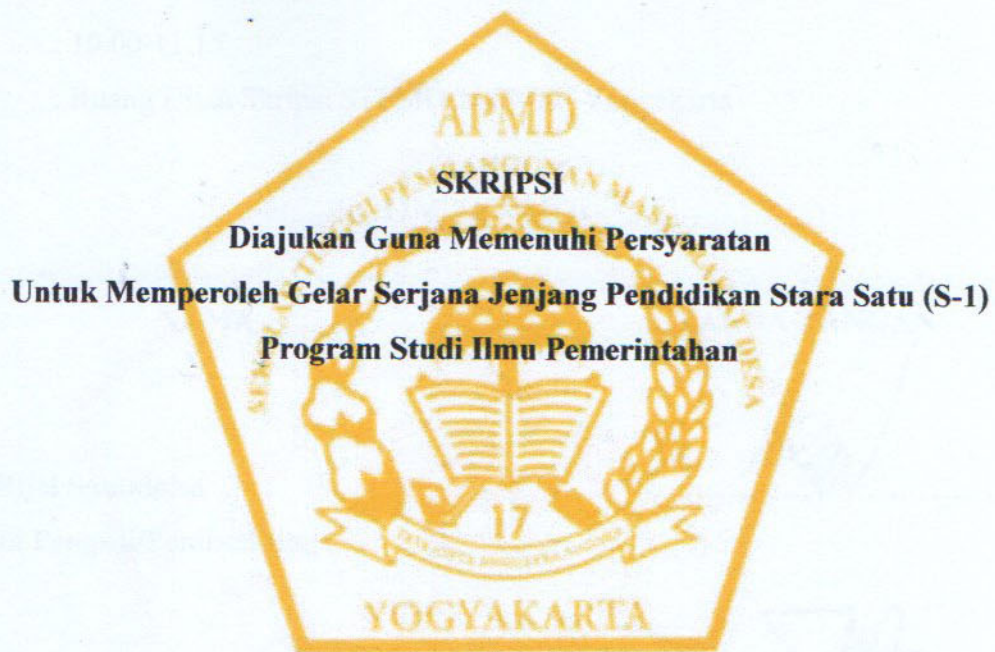
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2023

GERAKAN SOSIAL DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN

*(Study Historis Gerakan Sosial Masyarakat Kampung Code, Kelurahan Kota Baru,
Gondokusuman, Kota Yogyakarta dalam Menghadapi Kebijakan Pemerintah Kota
Yogyakarta tahun 1983)*



Disusun oleh:

YOHANES DIDIMUS SYUKUR

NIM : 18520054

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S-1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PENGESAHAN




Skripsi ini telah diuji dan dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 26, Mei 2023

Waktu : 10.00-11.15

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI APMD	
NAMA	TANDA TANGAN
1. Dr. Rijel Samaloisa Ketua Penguji/Pembimbing	
2. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.si Penguji Samping I	
3. Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.si Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Didimus Syukur

NIM : 18520054

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “GERAKAN SOSIAL DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN (*Study Gerakan Sosial Masyarakat Kampung Code, Kelurahan Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta dalam Menghadapi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 1983*)”, dengan studi, di Kampung Code, Kelurahan Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juni 2023

Penulis



Yohanes Didimus Syukur

MOTTO

“Janganlah hendak kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”.

(Filipi 4: 6)

“Hendaknya apapun yang saya miliki, dimana pun saya berada, saya dapat melewati apapun didalam dia yang menjadikan siapa saya”.

(Filipi 4: 13)

“Ubahlah Hidupmu, sebelum Hidup mengubahmu”

(Yohanes Didimus Syukur)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas segala perlindungan, berkat, cinta, dan kasih-Nya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“GERAKAN SOSIAL DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN (*Study Gerakan Sosial Masyarakat Kampung Code, Kelurahan Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta dalam Menghadapi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 1983*)”**, ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak bisa diselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus yang telah memberikan berkat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis belajar, berproses, dan menimba ilmu;
3. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta, sekaligus Dosen pembimbing Skripsi. Terimakasih atas segala arahnya serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Bapak Drs. Jaka Triwidaryatna, M.Si selaku Dosen penguji samping 1 yang telah banyak memberikan pencerahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Dra. B. Hari Saptaning Tyas, Msi selaku Dosen Penguji samping 2 yang telah banyak memberika saran dan kritik dalam memberikan perbaikan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu pengetahuan selama perkuliahan sehingga sangat berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
8. Seluruh karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani penulis selama proses perkuliahan dan penulisan Skripsi;
9. Pemerintah kelurahan Kotabaru dan terspesial masyarakat Kampung Code yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, skripsi ini terbuka untuk diperiksa ulang untuk dikritik demi mencapai kesempurnaan dan kebenaran yang semakin mendalam.

Yogyakarta, 21 Juni 2023

Penulis

Yohanes Didimus Syukur

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas semua anugerah, berkat, kasih dan kemurahan-Nya yang begitu luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dengan ungkapan hormat dan rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang Maha kuasa yang sudah melindungi dan menyertai dalam setiap nafas kehidupan saya;
2. Kedua orang tua saya Bapak Andreas Syukur dan Ibu Yuliana Paus yang selalu sabar menunggu menantikan kabar gembira terselesainya skripsi ini, terima kasih atas segala doa, penguatan, dukungan serta motivasi yang tidak pernah henti sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Untuk kakak tercinta, Kaka Vian djedaut, Kaka Astriana Siun, Kaka Daniel Kaluk, Kaka Leksan Jampur, sekaligus ponakan tercinta Aurelia, Awan, Deltryn, Si Jagoan Kembar (Vino, Vina), Onif, Viola dan Leora. Terima kasih telah menjadi kakak dan Ponakan yang baik dan luar biasa bagi saya. Terima kasih banyak atas doa dan dukungan yang selalu memberikan saya semangat dalam setiap langkah dan perjuangan yang saya lakukan;
4. Untuk teman-teman dekat penulis, Aldyano Jebarus, Tri Jehadut, Toni Ampur, Anak-anak kontrakan Om A'an, adik Bryan, Roy dan semua pihak yang tidak bias penulis sebutkan satu per satu Terima kasih atas dukungan kalian selama preoses penulisan skripsi ini; dan
5. Terima kasih juga saya berikan kepada The Special One Yolina Rita Calsia Lopez, penyemangat bagi penulis dalam menuliskan skripsi ini, terimakasih untuk semuanya;

6. Dan teman-teman angkatan 2018 yang tidak disebutkan namanya satu persatu
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, masukan, ide-ide, dan saran yang diberikan kepada penulis untuk proses penyelesaian skripsi

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Focus penelitian	12
D. Tujuan penelitian	13
E. Manfaat penelitian	13
F. Litertur review	14
G. Kerangka kosepsual	27
A. Gerakan Sosial	27
B. Kebijakan Publik	33
C. Hegemoni teori Antonio Gramsci.....	38
D. Resilience.....	46
E. Governmentality	50
H. Metode penelitian	55
A. Jenis penelitian	55
B. Unit analisis	56
C. Teknik Pengumpulan Data	58

BAB II GAMBARAN UMUM, DAN PROFIL KOTA YOGYAKARTA.....	63
A. Profil Kota Yogyakarta.....	63
B. Profil Kelurahan Kota Baru	73
C. Gambaran Umum Kampung Code	75
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	79
A. Rasionalitas Proses Pembuatan Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta	80
B. Taktik Gerakan social Masyarakat Kampung Code	93
C. Tujuan Gerakan Sosial Masyarakat Kampung Code.....	99
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	107
PEDOMAN WAWANCARA.....	110
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan	58
Tabel II.1 Batas Wilayah	65
Tabel II.2 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	66
Tabel II.3. Penduduk berumur 15 Tahun ke atas berdasarkan lapangan pekerjaan.....	67
Tabel II.4. Penduduk berdasarkan Usia	69
Tabel II.5 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	70
Tabel II.6 Sarana dan Prasarana Pendidikan	71
Tabel II.7 Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	72
Tabel II.8 Sarana dan Prasarana tempat Ibadah.....	73

ABSTRAK

Gerakan sosial adalah serangkaian aksi perlawanan dengan mengatasnamakan kelompok yang dirugikan oleh penguasa, dilakukan dalam bentuk protes publik, melalui tindakan-tindakan untuk menunjukkan bahwa kelompok tersebut solid, berkomitmen. Gerakan Sosial bukanlah sebuah aksi massa, seperti tindakan pemberontakan, kerusuhan dan revolusi massa. Tindakan seperti itu merupakan bentuk dari sebuah aksi massa yang tidak memiliki bentuk organisasi, sangat lembek, serta bersifat sementara dalam periode yang sangat singkat. Mengacu pada hal tersebut, gerakan sosial masyarakat Kampung Code gerakan yang berikhtiar untuk memperjuangkan kepentingan bersama, sebagai kelompok yang dirugikan oleh kebijakan Pemerintah 1983 yang tidak merefleksikan kepentingan masyarakat. Namun gerakan ini tidak melalui aksi pemberontakan yang menggerakkan massa tetapi lebih kearah penolakan dengan cara yang lebih baik dengan mengandalkan kekuatan politik yang ada, dan berkelanjutan dalam bentuk gerakan perubahan, gerakan akar rumput, dengan merubah pola kehidupan. Oleh karena itu gerakan sosial masyarakat kampung Code berhasil merefleksikan kepada kita bahwa dengan rasa kebersamaan, kemampuan yang ada tanpa adanya kekerasan mereka mampu bangkit dari baying-bayang kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat sendiri

Penelitian ini menggunakan Metode Historis dengan pendekatan Kualitatif subjek pada penelitian ini terdiri atas, Masyarakat Kampung Code dan Pemerintahan Kelurahan Kotabaru. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah pada tahun 1983, dengan tujuan mengetahui fenomena kasus gerakan sosial masyarakat Kampung Code pada tahun 1983, penentuan informan dalam penelitian menggunakan teknik snowball, agar peneliti menemukan informan yang betul-betul mengetahui pasti tentang gerakan masyarakat kampung Code tahun 1983.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, Rasionalitas kebijakan Pemerintah Yogyakarta, dan masyarakat Kampung Code tergambar ketika adanya perbedaan kepentingan. Pemerintah kota sebagai superordinasi mempunyai kepentingan dalam membangun wilayah perkotaan menjadi wilayah modern, di lain pihak Masyarakat Kampung Code tergusur sebagai subordinasi memiliki kepentingan pemenuhan kebutuhan dasar terutama pangan, papan. Namun dalam pembuatan kebijakannya tidak sesuai dengan tahapan pedoman dan proses pembuatan kebijakan pada tahun 1983, karena tidak melibatkan peran masyarakat aktif dalam proses pembuatan kebijakan. hal ini tidak mengindahkan asas demokrasi di Indonesia. Seharusnya dalam pembutaan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta, setiap elemen harus di libatkan. Agar melahirkan kebijakan Pemerintah yang baik dan benar. *Kedua*, taktik yang dilakukan Masyarakat Kampng Code dan Romo Mangunwijaya yakni melakukan pertemuan dengan Menteri sosial dan Lingkungan Hidup untuk mengupayakan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta pada 1983 untuk tidak dilakukan, melakukan aksi mogok makan. pada akhirnya Pemerintah Kota Yogyakarta mengurungkan niatnya untuk melakukan penggusuran dan menyepati permintaan Romo bersama Masyarakat Kampung Code, dengan syarat agar pemukiman Kampung Code dilakukan Penataan. Gerakan yang kedua ditandai dengan adanya gerakan perubahan masyarakat dengan melakuakan penataan pemukiman secara bergotong royong, melakukan pembinaan terhadap masyarakat Kampung Code, mengurus berkas-berkas administrasi masyarakat seperti KTP dan KK, tujuannya melegalkan keberadaan Kampung Code, dan melakukan pembinaan kerja terhadap masyarakat. Seperti melakukan kursus dan bina keterampilan masyarakat. *Ketiga* Gerakan Masyarakat Kampung Code dilakukan untuk memenuhi kepentingan bersama, Karena didasari pada adanya persamaan pandangan dalam sebuah kelompok masyarakat yang sama kemudian diwujudkan dalam aksi gerakan sosial masyarakat.

Kata Kunci: Gerakan sosial, Kebijakan Publik, Ketahanan sosial (resilience)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan menjadi salah satu cara untuk menggapai hal yang diinginkan pembangunan saat ini selalu identik dengan bentuk fisik seperti halnya bangunan, infrastruktur. Namun, pembangunan tidak hanya tentang bangunan saja, melainkan mencakup seluruh sector pada seluruh sistem sosial yang ada seperti halnya politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, Pendidikan, dan teknologi kelembagaan dan budaya (Abe 1994)¹.

Pembangunan dalam pemahamannya selalu mengingatkan kita akan rangkaian gagasan tentang sebuah kemajuan, kesejahteraan, dan kekayaan. Akan tetapi dalam praktinya, masih banyak fenomena tentang berbagai pembangunan yang terlalu masif dilakukan pemerintah justru menimbulkan permasalahan yang serius, pembangunan dengan cita-citanya yang “Agung” justru menemui kebuntuannya sendiri dan malah menjerumuskan rakyat ke jurang kesengsaraan.

Salah satu contohnya adalah kebijakan pembangunan dengan menggunakan metode pengusuran pemukiman, yang belakangan ini sering di cap sebagai perlakuan yang diskriminatif dari pemerintah terhadap sektor informal yang menjadi dan hal ini selalu menjadi kisah rutin dan cermin nyata betapa pembangunan yang berlangsung cepat itu sepertinya tidak pernah berpihak kepada kepentingan kaum lemah atau miskin mereka sering merasakan bahwa pemerintah hampir jarang berlaku adil. Bahkan hukum itu oleh penguasa sering dijadikan dasar legitimasi pemerintah di satu pihak, dan menjadi instrumen untuk menindas masyarakat yang miskin dan tertindas di lain pihak. Kenyataan

¹ Alexander, A. (1994). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pusat Jogja Mandiri

ini menunjukkan bahwa pembangunan terlebih lebih pembangunan di perkotaan sering tidak pernah memihak kepada kaum lemah dan miskin. Sehingga melahirkan suatu pandangan kepada banyak pihak yang menilai bahwa fenomena ini merupakan ketidakadilan dan ironi tentang kebijakan perkotaan

Pembangunan yang berjalan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sering dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan oleh pemerintah, kemudian secara tidak langsung menjadi sebuah ideologi yang tidak boleh diganggu gugat. Fenomena ini dinamakan gejala *developmentalisme* atau *pembangunanisme* yang justru membuat masyarakat sengsara. Pemerintah menjalankan pembangunan sebagai “kendaraan” yang berjalan mulus tanpa adanya control yang efektif dari masyarakat. Pembangunan dijadikan sebagai *Public space* (Ranah Publik) dimonopoli oleh negara sebagai penguasa dan cenderung bersifat represif.

Pemerintah di masa orde baru merupakan contoh dari rezim yang menerapkan ideologi *developmentalisme*. Akibatnya hal ini membawa berbagai dampak negatif bagi rakyat Indonesia yang ditandai dengan beberapa hal yakni; a) titik pembangunan berfokus pada pencapaian angka pertumbuhan ekonomi dengan mengesampingkan aspek distribusi demi pemerataan dan keadilan sosial. b) pembangunan mengorbankan pelestarian lingkungan hidup, penerapan ilmu dan teknologi modern dalam eksploitasi sumber daya alam mengakibatkan kerusakan pada lingkungan dan merjinalisasi penduduk setempat. c) hak-hak masyarakat dan politik menjadi korban demi tercapainya stabilitas politik negara dan suksesnya pembangunan pemerintah. d) berkembang bebasnya mental *easy going* di kalangan elit penguasa yang ditandai dengan kemudahan bagi mereka untuk menambah hutang luar negeri sebagai sumber pendanaan pembangunan tanpa mempertimbangkan beban rakyat dalam mengembalikan hutang tersebut. e) merajalelanya tindak korupsi dan

kolusi diantara penguasa dan pengusaha, karna kedua unsur saling berkolaborasi dan menjadi syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi.

Secara umum pembangunan dimaknai sebagai salah satu jalan untuk memajukan masyarakat dari yang sebelumnya masyarakat tradisional atau kuno menuju masyarakat modern, transisi ini sering disebutkan teori modernisasi. Perubahan ini disebabkan oleh revolusi penggunaan ilmu, teknologi dan management modern. Pembangunan dalam teori modernisasi ditandai dengan industrialisasi (pembangunan industri) yang diwujudkan dalam peningkatan dan efisiensi proses produksi dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam penerapannya modernisasi memunculkan banyak kritik. Hal ini dikarenakan modernisasi hanya menguntungkan elit-elit tertentu yang memiliki modal dan mengorbankan rakyat lemah yang diserobot tanahnya untuk kepentingan industri. Dampak lain dari laju modernisasi menyebabkan masyarakat miskin akan terus tertindas karena mereka tidak mempunyai “bekal” yang cukup untuk mengimbangi laju perkembangan modernisasi. Perubahan besar yang di wacanakan dalam teori modernisasi mengakibatkan pergolakan sosial, konflik etnis dan keagamaan, akibat kesenjangan sosial dan pertentangan nilai, Gerakan separatis, dan masalah sosial lainnya terutama di wilayah perkotaan. Lahirnya masalah-masalah sosial ini dalam masyarakat dijadikan sebagai alat pembenaran oleh penguasa untuk menerapkan politik Pemerintahan yang Otoriter dan represif

Menurut Remigo E. Agpalo (1992)² kecendrungan modernisasi untuk memunculkan otoriterisme dan hegemoni harus diimbangi dengan proses civilization

² Agpalo, R. (1992). *modernization, development, and civilization; reflections on the the prospects of political systems in the first, second, and third worlds*” in Kenneth E. Bouzon (ed.) *Development and democratization in thr third world*. Washington: Taylor and Francis.

yang dimaksud dengan proses transformasi dari situasi barbarisme (yang kuat menaklukkan yang lemah, yang modern harus menang atas yang tradisional, kota harus lebih penting dari desa, pusat menjadi tuan dan daerah menjadi hamba, rakyat harus tunduk dan bertanggung jawab terhadap penguasa dan bukan sebaliknya) menjadi kondisi yang di cirikan dengan pembangunan politik, kebebasan, dan demokrasi. terdapat tiga indikator utama pembangunan politik yakni tegaknya hukum (*rule of law*) civility (rasa kebersamaan dan kesederajatan untuk membela kepentingan umum, mengutamakan dialog bukan pemaksaan kehendak, mencari consensus dan menghindari penggunaan kekerasan) dan keadilan sosial.

Paradigma Modernisasi atau pembangunan perkotaan yang dianut negara-negara berkembang cenderung dipandang terlalu bias kota, mengejar status kota yang metropolis dengan beragam kemewahan, kota yang maju. Pembangunan ini kerap disoroti dan mendapat kritik karena mengutamakan pembangunan yang bersifat fisik dan mengorbankan masyarakat lemah.

Kebijakan pembangunan dengan menerapkan metode penggusuran yang dilakukan pemerintah Yogyakarta terhadap masyarakat di kampung Code yang terletak dibawah jembatan Gondolayu, Kelurahan Kota Baru, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan contoh nyata dari kejamnya pembangunan kota yang mengejar modernisasi pada saat itu. Pemerintah yang berdiri di saat itu secara paksa mengambil alih kepemilikan lahan yang sudah sejak lama di tempati masyarakat di kampung Code dan sudah dianggap sebagai Rumah bagi masyarakat tersebut. Selain itu, pemerintah Kota Yogyakarta mengklaim kepemilikan lahan tersebut atas nama negara sebagai aset daerah serta adanya program pembangunan demi kepentingan umum maka warga tidak mampu

mempertahankan penguasaan atas lahan dan tempat tinggalnya akibat kebijakan pengadaan tanah melalui pengusuran

Untuk diketahui Kali code merupakan salah satu sungai yang membelah kota Yogyakarta menjadi dua bagian yang meliputi bagian barat dan bagian timur, sungai ini memiliki Panjang kurang lebih 42 meter. Sungai ini dikenal sebagai sungai purba yang memiliki sisi historis dan merupakan salah satu ikonik kota Yogyakarta serta merupakan aliran lahar dingin yang mengalir dari salah satu gunung Merapi aktif di Indonesia. Di sepanjang bibir sungai kali code berdiri pemukiman warga, pemukiman ini sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu.

Pada tahun 1970an sampai awal tahun 1980an di lembah sungai Code ini berdiri begitu banyak rumah yang beratapkan triplek, gedhek dan gardus yang merupakan rumah tinggal bagi penghuni Kampung Code. Mereka yang menempati kampung Code merupakan kaum-kaum Urban, yang manggantungkan hidup di Ibukota sebagai pusat ekonomi. Namun dikarenakan mahalnya harga rumah sebagai tempat tinggal di kota membuat kaum ini memutuskan mencari tempat tinggal dengan harga yang sangat terjangkau, dan strategis sehingga dekat dengan tempat mereka bekerja. Kemudian mereka memutuskan untuk tinggal dan menetap di lahan-lahan kosong yang mereka anggap tanpa kepemilikan. Lalu membuat peradaban baru ditempat tinggal yang baru. Namun hal ini menjadi alasan bagi Pemerintah untuk melakukan penertiban pemukiman Code karna dapat mengganggu pemandangan di lingkungan Kota, apalagi lokasi Kawasan ini berada tepat di jantung Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Kota Yogyakarta pada saat itu menilai bahwa keberadaan kampung Code ini sangat tidak layak karena berada di sepadan sungai yang sangat rawan dengan bencana seperti banjir dan longsor.

Tahun 1983 merupakan tahun yang teramat kejam bagi masyarakat yang menempati kampung Code, Pemerintah pada saat itu bersikeras ingin menghilangkan citra Kawasan kumuh pemukiman Code yang letaknya sangat dekat dengan Tugu Yogyakarta yang merupakan ikon penting Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah pada saat itu menerbitkan kebijakan yang didalamnya berisi bahwa lembah kampung Code akan dibebaskan dari pemukiman kumuh dengan alasan bahwa letak Kawasan kumuh ini sangat berbahaya bagi kehidupan penghuninya, karena sepadan dengan sungai Code dan memungkinkan akan berpotensi terjadi bencana alam berupa banjir dan lonsor, dan tidak direkomendasikan sebagai Kawasan untuk tinggal, dan tentunya keputusan ini ditolak masyarakat karena beberapa pertimbangan. Namun pada saat itu rencana Pemerintah dihalau oleh Romo Y.B Mangunwijaya, yang merupakan seorang Rohaniwan, arsitektur kondang, dan budayawan beragama Katholik yang berpihak kepada Masyarakat miskin Kampung Code, Romo tetap menginginkan masyarakat kampung Code untuk tetap tinggal di Kawasan itu dan mendesak pemerintah untuk mengurungkan kebijakannya, hal ini juga didukung oleh pengamatan Romo sebagai seorang arsitektur yang menilai potensi bencana yang diramalkan tidak sesuai dan berdasarkan pengujian.

Romo Y.B Mangunwijaya dengan misi Kemanusiaan yang mulia berdiri bersama Masyarakat Kampung Code melawan bayang-bayang penggusuran yang menghantui. Dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat miskin yang berada di Kampung Code. Berbagai upaya dilakukan Romo sampai pada aksinya berupa Mogok makan, sampai melakukan pertemuan bersama menteri lingkungan hidup yang pada saat itu dijabat oleh Emil Salim untuk mendiskusikan Kampung Code. Perlu digaris bwhi bahwa berbagai bentuk gerakan ini tidak diwarnai oleh massa, dan pemberontakan. Hal ini kemudian pada akhirnya pemerintah menyetujui permintaan Romo Mangun dengan syarat bersedia membangun dan menata Kampung Code, agar lebih baik.

Pada tahun 1983, merupakan awal gerakan perubahan, gerakan akar rumput Masyarakat kampung Code dengan menggunakan bahan seadanya. Sebagai seorang Arsiter Romo Mangun mulai membangun rumah-rumah untuk warga menggunakan bahan sederhana, berupa bambu dan kayu. Menata rumah-rumah penduduk dengan konsep terbuka dan mengarah ke sungai code sebagai sumber kehidupan masyarakat serta memberikan sentuhan warna pada atap pemukiman Code dengan konsep warna-warni sebagai gambaran masyarakat kampung Code yang gembira dan ceria. Bukan hanya itu, keterlibatan Romo Mangun tidak hanya sampai disitu, Beliau juga turut terlibat dalam menata manusia yang ada di Kampung Code, seperti melakukan pendataan serta mendaftarkan penduduk Kampung Code secara administratif, seperti pengurusan KTP kepada masyarakat, pengurusan data C1 untuk yang sudah berkeluarga. Serta melakukan berbagai berbagai pembinaan kepada masyarakat. mulai dari menggali potensi yang ada di dalam diri tiap warga, membina agar masyarakat lebih produktif dan meninggalkan kebiasaan yang tidak baik. Sampai pada akhirnya pemukiman yang dahulu kumuh dan ditinggali oleh “gelandangan” ini kini menjadi tempat yang layak huni dan indah dipandang karena corak warna-warninya, serta menjadi salah satu tempat wisata di Yogyakarta. Buah dari kreatifitas ini kampung Code mendapatkan sebuah penghargaan *Aga Khan Award* pada tahun 1992. Penghargaan ini merupakan penghargaan internasional yang diberikan kepada arsitektur sebuah bangunan dan mendapatkan berbagai apresiasi yang besar dari beberapa pihak termasuk Menteri lingkungan hidup, yang saat itu dijabat oleh Emil Salim. Hingga saat ini kampung Code menjadi preseden untuk pelbagai inisiasi di ranah pemukiman informal.

Bentuk langkah yang diambil Masyarakat Kampung Code yang digawangi oleh Romo Mangunwijawa merupakan sebuah bentuk gerakan sosial demi mempertahankan hak sosial masyarakat. Masyarakat yang tadinya dirundung Kebijakan Pemerintah tahun

1983 yang ingin melakukan pengusuran pemukiman kumuh Code berusaha mendekati Pemerintah melakukan berbagai cara agar kebijakan itu tidak terjadi kepada masyarakat, Masyarakat berusaha kuat bersama Romo Mangun Wijaya berusaha meyakinkan pemerintah bahwa masyarakat bisa berusaha lebih baik sesuai yang diharapkan.

Gerakan sosial ini juga lahir karena masyarakat merasa bahwa kehidupan mereka mendapat ancaman, gangguan dari pemerintah yang menyerang mereka melalui kekuasaannya, *powernya*, kemudian mereka membentuk sebuah “benteng” perlawanan untuk membela diri agar mereka bisa terlepas dari ancaman dan gangguan itu sendiri, masyarakat berburu menjadi kelompok dan mengarahkan tujuan mereka untuk menentang kebijakan Pemerintah. Masyarakat melakukan berbagai cara agar kehidupan mereka bisa terkendali dan kembali tentram bahkan lebih baik dari itu, serta memetakan kehidupan mereka kearah yang lebih baik. Salah satu cara yang mereka lakukan dengan melakukan sebuah Gerakan yang menentang kebijakan pemerintah serta melakukan negosiasi agar baiknya tindakan pengusuran itu tidak dilakukan. Hingga pada akhirnya masyarakat yang terbentuk dalam komunitasnya memunculkan gerakan akar rumput dengan tujuan mengupayakan perbaikan pemukiman informal. Masyarakat bersama-sama berjuang dalam sebuah komunitas untuk memperjuangkan tujuan mereka bersama. Gerakan sosial ini sejatinya lahir dari kekecewaan, keresahan masyarakat terhadap pemerintah yang seharusnya menjadi agen yang berpihak kepada masyarakat, tapi justru menjadi pedang yang akan membunuh masyarakatnya sendiri.

Pada dasarnya Gerakan sosial atau *social movement* merupakan sebuah aktifitas yang diorganisir yang ditunjuk untuk mendorong atau menghambat perubahan sosial (*encourages or discourages social change*). Macionis (1999: 607) berdasarkan pemahaman ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang menjadi ciri utama dari Gerakan sosial, yaitu; a) terdapat aktifitas yang sudah diorganisir. Dan b) adanya tujuan

yang berkaitan dengan perubahan sosial. sementara penjelasan yang lain menjelaskan bahwa Ketika sekelompok orang mengatur (mengorganisir) diri dalam upaya untuk mendorong dan menolak beberapa jenis perubahan sosial maka mereka sedang menciptakan Gerakan sosial, kemudian mereka mengandalkan sedikit atau banyak kekuatan politiknya dan bergabung secara bersama-sama menjadi satu untuk mendapatkan atau memperjuangkan beberapa hal. Dari beberapa teori ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa Gerakan yang dilakukan masyarakat Kampung Code murni sebagai Gerakan sosial yang ditujukan untuk berjuang bersama agar mereka mendapatkan dan mewujudkan apa yang mereka harapkan.

Pada penelitian ini, peneliti menggabungkan sebuah konsep yang mewarnai sekaligus melatar belakangi Gerakan sosial yang diangkat dengan konsep Resilience (ketangguhan) masyarakat. Menurut *Asian Disaster Reduction respons network (2009)*³ ketangguhan (*resilience*) adalah kemampuan sebuah system, komunitas, atau masyarakat yang terpapar ancaman bahaya untuk bertahan terhadap, menyerang, berakomodasi dengan dan pulih dari dampak-dampak sebuah ancaman bahaya dengan tepat pada waktunya dan secara efisien, termaksud dalam pemeliharaan dan pemulihan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasar yang paling mendasar

Pada konsepnya resilience berfokus pada pemahaman kemampuan sistem, organisasi, kebijakan, dan individu untuk bertahan dalam rentang waktu ke waktu terhadap guncangan “eksternal” (tanpa, bagaimanapun, mengidentifikasi alasan khusus atau penyebab kemampuan itu) sementara, ketangguhan secara langsung menghubungkan dinamika sistemtik/organisasi/kebijakan dengan penilaian kapasitas kerja yang sama dalam menghadapi segala jenis gangguan internal/eksternal

³ Asian Disaster Reduction Response Network. (2009) Terminologi pengurangan resiko bencana. Diakses pada Oktober 14 2022.
http://www.preventionweb.net/files/7817_isdrindonesia.pdf

Resilience pada dasarnya merupakan ketahanan sosial yang merupakan kemampuan suatu kelompok atau sistem sosial (keluarga, komunitas, dan masyarakat) untuk bertahan terhadap berbagai tantangan yang disebabkan oleh perubahan yang mengganggu. Gangguan sosial dapat dipicu oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Suatu kelompok sosial yang memiliki ketahanan sosial tidak hanya menunjukkan keterikatan (kohesifitas) yang kuat dalam kondisi gangguan, namun juga mampu menyerap gangguan tersebut dan menyesuaikan diri setelah gangguan tersebut hilang. Fenomena ketangguhan masyarakat Kampung Code tergambar Ketika dimana mereka Bersatu dalam komunitas masyarakat kemudian bersama-sama bertahan serta berjuang bersama menentang kebijakan pemerintah 1983, dalam bentuknya mereka bersama-sama membangun rumah mereka, kemudian mereka dibina.

Dalam penelitian ini, peneliti memhamami bahwa Gerakan sosial dan resilience (ketangguhan) merupakan dua hal yang terikat dan berperan aktif dalam kasus kehidupan Masyarakat Kampung Code pada tahun 1983 dalam menanggapi kebijakan penggusuran pemerintah Kota Yogyakarta. Masyarakat Kampung Code dalam Menghadapi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 1983. Hal ini secara tidak langsung berkaitan dalam menanggapi praktik yang dibangun dan tergambar oleh masyarakat. Resilience yang dibangun masyarakat Kampung Code saat ini dilatar belakangi dengan beberapa alasan yang mereka sebagai masalah bersama, kemudian Bersatu untuk memperjuangkan dan mendapatkan cita-cita bersama itu.

Peneliti juga mencoba mengaitkan studi kasus yang terjadi di kampung Code dengan konsep pemikiran Antonio Gramsci tentang Hegemoni. Menurut peneliti Pemikiran Gramsci tentang hegemoni yang mengungkapkan tentang struktur kekuasaan sejalan dengan studi peneliti dalam kasus Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat Kampung Code. Menurut Gramsci, dominasi kekuasaan dapat diwujudkan dengan dasar-

dasar kebudayaan dan politik. Hegemoni dalam pemikiran Gramsci mengarah kepada kepemimpinan moral yang terjadi di setiap aspek dalam relasi sosial antara kelompok penguasa dan kelompok yang di subordinasi. Faruk (2014: 137)⁴ menjelaskan bahwa dalam kerangka teori Gramsci setidaknya ada enam konsep kunci yakni kebudayaan, hegemoni, ideologi, kepercayaan populer, kaum intelektual dan negara.

Basic dasar pemikiran tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas lain yang berada dibawah dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni dijalankan dengan cara kepemimpinan yang mempraktikan kekuasaannya. Pemerintah melakukan hegemoni kepada masyarakat di kali code, dengan memakai “kendaraan” sebagai pemimpin untuk menjalankan kekuasaan kepada masyarakat lemah. Masyarakat Kampung Code menyadari bahwa praktik kekuasaan telah menindas mereka, namun mereka tidak mempunyai kuasa untuk merubah kenyataan itu.

Melihat berbagai uraian diatas peneliti perlu menarik sebuah gagasan bahwasanya semangat hidup masyarakat Kampung Code yang terus bertahan dengan mengandalkan sedikit kemampuan politiknya mampu melawan arus kebijakan pemerintah. sejauh ini penliti mengamati bahwa Masyarakat kampung Code merupakan salah satu potensi kota, kehidupan kota akan timpang jika salah satu potensi kehidupannya hilang, oleh sebab itu pola kebijakan pemerintah dalam perencanaan kota yang modern dan formal dengan teorganisinya menjadi semakin teratur dan terarah. Kebijakan pemerintah yang matang dengan dasar penatan yang baik dari pemerintah maka terciptanya harmonisasi dalam kehidupan kota yang akan meningkatkan kehidupan bangsa dan negara.

⁴ Faruk. (2014). *Pengantar sosiologi Sastra. edisi Revisi*. Yoyakarta: Pustaka Pelajar

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan utama dalam tulisan yakni;

- a) Bagaimana Rasionalitas pembuatan kebijakan Pemerintah kota Yogyakarta dan Masyarakat Kampung Code?
- b) Bagaimana taktik gerakan sosial masyarakat Kampung Code dalam menentang kebijakan pemerintah?
- c) Apa tujuan gerakan Masyarakat Kampung Code?

C. Focus penelitian

Focus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Manfaat lain adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan Penentuan focus penelitian lebih diarahkan pada uptade informasi yang diperoleh dari situasi sosial dengan maksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus untuk membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan yang tidak relevan

Menurut Sugiyono (2017: 207)⁵ pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan reliabilitas masalah yang akan dipecahkan. Focus penelitian ini meliputi;

1. Rasionalitas kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 1983 dan gerakan social masyarakat Kampung Code
2. Menelaah taktik Gerakan Sosial Masyarakat Kampung Code dalam menentang kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 1983

⁵ Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitaif dan R & D*. Bandung:Alfa Beta.

3. Menelaah tujuan Gerakan sosial Masyarakat Kampung Code tahun 1983

D. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gerakan sosial masyarakat Kampung Code dalam menghadapi kebijakan di kota Yogyakarta yang dirangkai dalam sebuah gerakan sosial masyarakat dalam menentang kebijakan pemerintah tahun 1983 tentang pengusuran pemukiman Masyarakat Kampung code

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut;

a) Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi-studi mengenai perbuatan dan aktivitas pemerintah yang dikaji dari kasus pengusuran Kampung Code. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya

b) Manfaat Praktis

a. Bagi penghuni

Penelitian ini diharapkan mampu membentangkan gambaran serta menjadikan perjuangan mereka sebagai salah satu contoh bahwa gerakan yang didasari pada tujuan yang sama dan dasar yang kuat menjadikan mereka mampu untuk menerobos kebijakan Pemerintah kepada dan diharapkan sejarah tahun 1983 bisa dijadikan pembelajaran kehidupan di masa depan

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan agar dapat menghasilkan

kebijakan yang baik serta dapat diterima masyarakat. melalui proses-proses yang mendukung pembuatan kebijakan

F. Litertur review

Pada dasarnya penelitian tentang studi tentang kasus pengusuran lahan warga bukanlah hal yang baru. Penelitian-penelitian terdahulu telah berupaya mengungkapkan fenomena-fenomena kasus pengusuran dari prespektif yang berbeda. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut;

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Seftia Azrianti, Mia Safitri (2020) tentang Perlindungan hukum terhadap rumah liar di Baloi kolam Kota Batam sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum⁶. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap warga yang terkena rumah liar, dan untuk menggali lebih dalam tentang prosedur penertiban rumah liar yang benar dan sejalan dengan undang-undang yang ada. Hasil dari penelitian ini digambarkan peneliti dalam dua arena yang dapat dipilih pemerintah yakni, arena pencabutan hak atas tanah dan pelepasan hak atas tanah. Keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda. Hal ini dilihat dari aspek kewenangan pemerintah daerah yang dianilisi menggunakan teori kewenangan, aspek produser, dan teori ganti kerugian dengan pendekatan ekonomi dalam hukum, aspek perlindungan hukum dan aspek perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat dilakukan dengan cara preventif melalui sosialisasi, mencari kesepakatan dengan tahapan-tahapan yang dilalui. Tujuannya adalah untuk mendapat kepastian hukum, mendapat ganti rugi sebagaimana telah

⁶ Seftia, A. &. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap rumah liar di Baloi Kolam Kota Batam sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum . *Petita*, Vol. 2 No. 1, 38-49.

disepakati. Sedangkan tindakan pencabutan hak atas tanah tidak melindungi warga masyarakat secara utuh, meskipun ada hak untuk menggugat dan melalui tahapan pada proses peradilan, namun hasilnya tetap akan melukai rasa keadilan dan pencabutan hak atas tanah hanya memberikan perlindungan hukum represif. Kewenangan Pemerintah Kota Batam atau BP Batam dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum berdasarkan hukum pemerintah Kota Batam terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Juga hukum sektoral bidang pertanahan yang merupakan wewenang sifatnya delegasi dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kota Batam

Prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Daerah Kota Batam dilakukan dengan cara melakukan kesepakatan dengan warga masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan untuk kepentingan umum, akan tetapi jika tidak ada kesepakatan maka pemerintah Kota Batam atau Bp Batam mengambil tanah dengan Menertibkan secara paksa dan memberi ganti kerugian Berupa uang tunai dan kavling siap bangun (KSB) .Sedangkan dari aspek ganti kerugian ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan apabila tidak disepakati, maka pihak warga masyarakat dapat menempuh jalur peradilan dengan mengajukan ke PNT, PTUN, dan Mahkamah Agung, hasil keputusannya menjadi keharusa menerima dan melepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan umum

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Akiyar Tri Cahyono (2020) yang berjudul dampak sosial ekonomi relokasi korban penggusuran bangunan diatas tanah pemerintah kota Surabaya (studi pada penghuni rusunawa keputih)⁷. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi serta menganailis kondisi objektif korban

⁷ Cahyono, T. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi korban penggusuran Bangunan di atas tanah pemerintah kota Surabaya (Study pada penghuni Rusunawa Keputih) . *Paradigma 9 (1)*.

penggusuran yang direlokasikan pemerintah kota Surabaya ke rumah susun keputih. Penelitian ini menggunakan teori structural konflik dari Ralf Dahrendorf yang membahas tentang perbedaan distribusi otoritas yang mengakibatkan lahirnya kelompok-kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok kepentingan ini terlihat dari kepentingan kelompok superordinasi dan subordinasi. Hasil dari penelitian ini tergambar dari kajian objektif sosial dan ekonomi. Interaksi sosial masyarakat terlihat sangat berbeda saat sebelum dan sesudah mereka ditempatkan di rusunawa keputih. Sebelumnya interaksi masyarakat sangat harmonis, saling bertegur sapa dan Ketika sore hari saling bercengkrama di depan rumah, mengobrol dengan tetangga. Namun sekarang keharmonisan itu tampak asing terlihat karena warga penghuni rumah susun cenderung menutup diri selain itu tidak ada fasilitas pendukung untuk melakukan interaksi, masih belum disesiakan oleh pengelola rumah susun. Norma sosial warga yang dimiliki di tempat tinggal sebelumnya mengalami akulturasi dengan norma sosial di tempat yang baru. Seperti adanya pembatasan jam malam di rumah susun, tidak membuat kegaduhan Ketika tinggal di rumah susun dan saling menjaga ketertiban umum saat berada di rumah susun.

Kondisi ekonomi warga korban penggusuran pun tidak luput dari perubahan. Dari sebelumnya warga yang memiliki pendapatan dari berjualan makanan, membuka warung kopi dan usaha persewahan baju tradisonal yang sudah berkiprah hampir 10 tahun lamanya dan bahkan memiliki pelanggan tetap kini harus menghadapi kenyataan membangun usaha baru karena mereka sudah kehilangan tempat tempat untuk berjualan dan bahkan kehilangan pelanggan. Hal ini berdampak pada kehidupan finansial warga yang terpaksa mengurangi kebutuhan yang tidak di perlukan demi menjaga kebutuhan mendesak warga.

Terjadinya konflik sosial antar warga dengan pemerintah disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan. Pemerintah kota sebagai superordinasi mempunyai

kepentingan dalam membangun wilayah perkotaan menjadi wilayah modern yang memiliki infrastruktur yang memadai, bersih dan tertata rapi, di lain pihak warga kota tergusur sebagai subordinasi memiliki kepentingan pemenuhan kebutuhan dasar terutama pangan, papan dan Pendidikan. Terjadinya perbedaan otoritas. Pemerintah kota memiliki otoritas dan menggunakan otoritasnya untuk menata dan membangun wilayah kota, salah satunya dengan melakukan penggusuran terhadap bangunan-bangunan milik warga. Di lain pihak, warga yang tergusur rumahnya tidak memiliki otoritas bahkan harus tunduk pada otoritas tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Primawardani (2018) yang berjudul peremajaan dan pengembangan wilayah perkotaan melalui penggusuran dalam perspektif hak asasi manusia di kota Surabaya⁸. Penelitian ini menjelaskan pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh Tindakan penggusuran. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah berupaya melaksanakan kebijakan berupa perda tentang bangunan dan perda penggunaan jalan secara humanis dengan mempertimbangkan hak asasi manusia. Hal ini terlihat pada berbagai tahapan yang dilakukan sebelum melakukan penertiban antara lain melakukan sosialisasi, pemanggilan dan pemberian bantuan dana untuk kepindahan mereka. Akan tetapi tidak semua warga yang terkena penertiban dengan penggusuran tersebut disediakan rumah oleh pemerintah daerah. Alasannya, dikarenakan warga yang terkena dampak tidak memenuhi persyaratan yang ada, berupa harus memiliki KTP Surabaya. Dengan demikian, belum semua warga yang terkena penertiban terpenuhi hak-haknya atas tempat tinggal yang layak.

⁸ Yuliana, P. (2018). PEREMAJAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN MELALUI. *Jurnal HAM, Vol 9, No 1.*

Keempat. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Syukur (2019) yang berjudul Praktik Hegemoni Mahasiswa senior terhadap junior di dalam kehidupan kampus⁹. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan; a) bentuk hegemoni yang dilakukan mahasiswa senior terhadap junior di Universitas Negri Makassar. b) tingkatan hegemoni yang dilakukan mahasiswa senior di Universitas Negri Makassar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; a) bentuk hegemoni yang dilakukan mahasiswa senior terhadap junior di Universitas Negri Makassar adalah bentuk persetujuan, dominasi dan kepemimpinan intelektual dan moral. b) tingkatan hegemoni yang dilakukan senior di Universitas Negri Makassar berada pada tingkatan hegemoni yang merosot (*decadent hegemony*). Hubungan antar mahasiswa senior dan junior di Universitas Negri Makassar meskipun terjalin baik tetapi hanya beberapa junior saja yang menjalin keakraban. Terdapat kecanggungan antar mahasiswa senior dan junior. Mahasiswa junior aktif dalam mendukung kegiatan mahasiswa senior di organisasi tingkat kemahasiswaan baik di tingkat program studi, fakultas, dan universitas karena adanya rasa sungkan apabila tidak melaksanakan arahan senior dan keterpaksaan karena adanya sanksi yang diberikan senior.

Kelima. Penelitian yang dilakukan oleh Manulu Dimpos (2016) yang berjudul Gerakan sosial dan perubahan kebijakan Publik. Kasus perlawanan masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama¹⁰. Tujuan dari penelitian ini untuk menunjukkan peran Gerakan-gerakan sosial mendorong perubahan politik dan kebijakan Publik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Gerakan perlawanan masyarakat Porsea dan Toba Samosir menjadi salah satu kasus yang menarik, hak-hak masyarakat sipil bisa digapai serta

⁹ Muhamad, S. (2019). Praktik Hegemoni Mahasiswa Senior terhadap junior di dalam lingkungan kampus. *Society*, Vol. 7, No. 2, 77-89.

¹⁰ Manulu, Dimpos. "Gerakan Sosial Dan Perubahan Kebijakan Publik Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, Di Porsea, Sumatera Utara." *Populasi* 18.1 (2016).

pembuatan dan perubahan kebijakan Publik bisa terjadi karena desakan-desakan Gerakan sosial dan tanpa harus menunggu inisiatif actor-aktor negara (birokrasi dan parlemen) demikian pula mekanisme perubahan dan lahirnya kebijakan Publik tidak mengikuti logika-logika rasional dan rigid yang secara umum dikenal dengan teori-teori klasik kebijakan Publik

Dalam konteks inilah tampak pentingnya Gerakan sosial dalam mempengaruhi kebijakan Publik dalam mendesak terjadinya perubahan kebijakan Publik Ketika berbagai mekanisme dan jalur formal amat minim, bahkan tertutup. Di sisi lain, berbagai perdebatan “rasional” dalam ilmiah di media massa, perdebatan para ahli, kontroversi di Gedung parlemen atau berbagai produser formal pengambilan kebijakan Publik yang berada di dalam dominana negara menjadi variable-variabel yang hanya berarti dan mungkin terjadi karena desakan Gerakan sosial tersebut.

Keenam. Penelitian yang dilakukan oleh Pratisto Pramaiswara, dkk (2022) yang berjudul Gerakan sosial baru (study tentang kontribusi benua lestari Indonesia dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di kota Tangerang)¹¹. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Gerakan sosial baru yang dilakukan oleh Yayasan Benua Lestari Indonesia di bidang lingkungan hidup, dengan menggunakan perspektif Gerakan sosial baru Macdonald. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam konteks gerakan sosial, Benua Lestari Indonesia termasuk dalam klasifikasi gerakan sosial baru karena program dan gerakan yang dilakukan berfokus pada lingkungan hidup yang lebih berfokus pada aspek humanis dan non-materialis. Permasalahan lingkungan hidup khususnya persampahan di Kota Tangerang menjadikan alasan Benua Lestari Indonesia

¹¹ Pramaiswara, P., Wibisono, D., & Syah, P. (2022). Gerakan Sosial Baru (Studi Tentang Kontribusi Benua Lestari Indonesia Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Kota Tangerang). *Jurnal Sociologie*, 1(2), 196-217.

memperjuangkan lingkungan sekitar dengan melaksanakan program guna menciptakan lingkungan Kota Tangerang yang lebih baik

BLI selaku aktor utama, melakukan kontribusi penting demi terwujudnya tujuan Gerakan sosial. kontribusi tersebut dibagi menjadi 3 peran yaitu sebagai kekuatan penyeimbang, gerakan pemberdayaan masyarakat dan sebagai perantara. Sebagai kekuatan penyeimbang. Benua Lestari Indonesia melakukan advokasi berupa pendampingan masyarakat dalam program yang diberikan oleh DLH, menyampaikan permasalahan dan melakukan lobi terkait kebijakan tersebut. Benua Lestari Indonesia melakukan audiensi dengan DLH terkait keluhan kesah yang dirasakan masyarakat baik efek dari kebijakan maupun program yang disusun.

Selanjutnya, peran sebagai pemberdaya masyarakat dilakukan BLI dengan melahirkan berbagai macam cara dan program. Program magang, volunteer Less waste event, bank sampah, kampung peduli sosialisasi media sosial dan Pendidikan lingkungan merupakan segelintir program BLI yang sudah dilaksanakan. Pemberdayaan dilakukan guna mencapai kemandirian kelompok masyarakat dalam memecahkan permasalahan lingkungan hidup.

Peran Benua lestari Indonesia sebagai Lembaga perantara diwujudkan dengan cara melakukan kerjasama dan membangun jaringan dengan organisasi ataupun lembaga lain. Beberapa pihak yang sudah menjalin kerja sama diantaranya, pihak pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Seluruh kerja sama bertujuan untuk keberhasilan program dalam mengatasi permasalahan lingkunganhidup di Kota Tangerang.

Keberhasilan dan konsistensi gerakan sosial baru yang dilakukan BLI dalam memberikan kontribusi terhadap Kota Tangerang tak luput dari peran determinasi yang selalu dijalankan baikoleh BLI. Peran determinan tersebut diantaranya organisasi

kepemimpinan dan pemimpin, jaringan dan partisipasi, sumber daya dan yang terakhir adalah peluang dan kapasitas masyarakat. Kelima faktor tersebut yang menentukan bertahan atau tidaknya sebuah gerakan. BLI manajemen faktor dengan baik dan benar sehingga gerakan sosial baru yang dilakukan bisa berkembang dan konsisten

Ketujuh. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Lestari dan Dr. Nensiliani, S.pd.,M.Hum. (2019) yang berjudul Hegemoni kekuasaan dalam novel negeri di ujung tanduk karya Tere Liye. (pendekatan teori hegemoni Antonio Gramsci)¹². Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan; a) hegemoni tokoh dalam bentuk ideologi, b) hegemoni negara dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Tere Liye. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tokoh-tokoh berkuasa yang digambarkan memberi hegemoni atau pengaruh kepada orang lain berdasarkan bentuk ideologinya yaitu (otoritarisme) Thomas, JD, Rudi, (feodalisme) Presiden, Ratu, partai politik, (kapitalisme) Thomas, Opa Chan, dan Shinpei, (sosialisme) Opa Chan, JD, dan Thomas. Semua tokoh tersebut memiliki cara yang berbeda untuk menghegemoni orang-orang yang berada di sekitarnya. Cara-cara tersebut disiasati oleh masing-masing tokoh dengan peran dalam dunia politik sehingga mampu menghegemoni orang di sekitarnya berdasarkan ideologi yang dimiliki. Beberapa tokoh atau posisi yang menggambarkan hegemoni negara (sipil) yaitu sebagai anggota klub petarung, Theo, Thomas, Lee, sebagai wartawan yaitu Johan, Maryam, dan sebagai guru sekolah Alim, (politik) Thomas sebagai konsultan politik, Liu sebagai kepala pasukan antiteror Hong Kong SAR, JD sebagai gubernur sekaligus kandidat presiden, Rudi sebagai komandan polisi, seseorang sebagai kepala badan penyidik kepolisian, dan seseorang sebagai petinggi partai. Masing-masing dari mereka juga menghegemoni dengan cara yang berbeda, berdasarkan kekuasaan individunya. Masing-

¹² Nensiliani, L. L. (2019). Hegemoni kekuasaan dalam novel Negeri diujung tanduk karya Tere Liye (pendekatan teori Hegemoni Antonio Gramsci). *Diss. FBS*.

masing tokoh tersebut menggunakan kekuasaan, wewenang, atau haknya untuk orang lain sebagai lawan bicaranya agar dapat memenuhi keinginan tokoh tersebut

Kedelapan. Penelitian yang dilakukan Fauzia Gustarina Cempaka Timur dan Jamaluddin Syakirin (2018) yang berjudul Peran Community Resilience di Amerika Serikat dan Inggris dalam Upaya Kontra Terorisme¹³. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunitas dan mengemukakan pentingnya ketahanan dalam komunitas dalam usaha memerangi terorisme hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Meskipun banyak negara terus berjuang dengan prinsip-prinsip untuk melakukan kemitraan praktis dengan aktor-aktor non-negara pada agenda keamanan dan strategi kontra-terorisme, namun pendapat yang berbeda dari tiap-tiap kementerian di Inggris terutama jika mengkaitkannya dengan pentingnya melibatkan peran serta komunitas di dalam strategi tersebut. Otoritas penegakhukum lokal yang utuh tidak memahami mengenai hubungan dengan komunitas Muslim dan komunitas pendatang dapat mengakibatkan dampak buruk yang tidak dapat dihindari. Sehingga penting untuk kedua negara mewujudkan kesepahaman dari berbagai sisi atas kebijakan ini. Dalam situasi media dan lingkungan politik yang serba sulit dan sensitif, kebijakan ini tetap menjadi prioritas bagi strategi kontra-terorisme yang dimiliki Inggris.

Namun, kejadian 9/11 di Amerika Serikat membuat pendekatan dengan basis komunitas ini sedikit lebih tumpul melihat bahwa tren yang muncul bersifat internasional, di luar negeri dan ancaman transnasional yang terkoordinasi (R. Briggs, C. Fieschi dan L. Lownsborough, 2006: 19). Beberapa resep yang dapat diterapkan di negara-negara tersebut jika mengkaitkannya dengan peran serta komunitas dalam strategi kontra-terorisme adalah pemerintah harus mengadopsi strategi lebih baik ada dibanding tidak ada

¹³ Cempaka Timur, d. (2018). Peran Community Resilience di Amerika Serikat dan Inggris dalam upaya kontra terorisme. *Jurnal Sospol*, Vol.4, No 1, 21-36.

sama sekali jika berhubungan dengan kerjasama bersama komunitas. Selain itu pemerintah harus dapat berinvestasi secara tepat untuk membangun pengetahuan masyarakat terhadap terorisme dibanding membayar konsultan dari luar yang tidak mengerti mengenai daerah tersebut. Selanjutnya pemerintah juga perlu untuk memfokuskan kembali pada tujuan akhir pemberantasan terorisme pada deradikalisasi dan hal ini harus dilakukan terpisah dari sifat aksi hulu yang dilakukan komunitas. Terakhir, komunitas harus dipayungi organisasi besar yang merupakan perpanjangan dari program pemerintah yang mengajak masyarakat untuk fokus pada upaya memperkuat ketahanan dan kapasitas semua lini masyarakat yang dianggap rapuh, tidak hanya Muslim bagi Inggris, atau kelompok tertentu di Amerika Serikat.

Kesembilan. Penelitian yang dilakukan oleh F.X Fajar Ly No dan Rodriques Servantius (2020) yang berjudul Negara Versus Masyarakat Adat study tentang resistensi masyarakat adat Dhawe atas keputusan pemerintah kabupaten Nagekeo tentang alih fungsi lahan Mbay kiri¹⁴. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang gerakan perlawanan dari masyarakat terhadap keputusan pemerintah tentang alih fungsi lahan Mbay kiri. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa Fungsi pemerintah dalam mewujudkan cita- cita masyarakat agar lebih sejahtera nyatanyamasih jauh dari harapan, proses dalam pengambilan keputusan oleh Pemda Nagekeoyangmelakukan alih fungsi lahan Mbay Kiri ini nyatanya belum mendapatkan persetujuan yang sah oleh pihak masyarakat, terkhususnya oleh pihak masyarakat suku (Suku Dhawe) yang merupakan suku penyerah lahan Mbay Kiri ini.

¹⁴ F.X Fajar, & R. (2020). Negara Versus Masyarakat Adat: Studi tentang Resistensi masyarakat adat Dhawe atas keputusan Pemerintah Kabupaten Nagekeo tentang alih fungsi lahan Mbay timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1 (1), 15-29.

Melihat dari indikator yaitu adanya sosialisasi, dan juga musyawarah yang seharusnya dilakukan oleh Pemda untuk mendapatkan respon dan juga tanggapan atas harapan yang jelas dari masyarakat. Sosialisai yang dilakukan oleh pemda sebenarnya belum maksimal untuk dilakukan alasannya adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pemda tidak mencakup seluruh masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat yang nantinya akan mendapatkan hasil dari keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Pada indikator selanjutnya yaitu, Musyawarah untuk menentukan jalan keluar nyata yang belum mampu mengakomodir secara keseluruhan kepentingan masyarakat, dalam hal ini percontakan sawah, Mbay Kiri yang belum terwujudkan. Fungsi Pengambilan Keputusan dalam alih fungsi lahan Mbay Kiri oleh Pemda Nagekeo, melihat dari indikator, memperhatikan dan memikirkan kepentingan masyarakat, untuk sementara fungsi dari setiap keputusan alih fungsi lahan yang dilakukan oleh Pemda belum mencapai target dalam memperhatikan dan memikirkan kepentingan dari masyarakat, pernyataan ini dikuatkan dengan adanya perusahaan Garam Cheetam Indonesia yang melakukan investasi lahan disekitaran area Mbay Kiri, pada dasarnya setiap masyarakat yang mengharapkan agar Pemda membuat keputusan untuk menjadikan sebagai lahan Mbay Kiri sebagai lahan irigasi sawah yang dapat memfungsikan semua masyarakat dalam membudayakan tanampadi sebagai memenuhi kebutuhan. Perusahaan Cheetam yang memperoleh kontrak investasi oleh Pemda tidak membawa dampak positif dalam mencapai taraf kesejahteraan dan kepentingan masyarakat, yang dikarenakan perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan dipenuhi dengan standar yang tidak tercapai oleh masyarakat, fungsi dari hasil keputusan ini menuai masalah dalam alih fungsi lahan Mbay Kiri yaitu dilakukannya penolakan atas keputusan Pemda oleh masyarakat suku dan juga beberapa kelompok masyarakat lainnya yang dirasa keputusan alih fungsi

lahanbelummemiliki daya guna yang besar dalam mencapai kepentingan dan mensejahterakan kehidupanmasyarakat.

Kesepuluh. Penelitian yang di lakukan oleh Puji Kurniawan (2018) yang berjudul Masyarakat dan negara menurut Al-Farabi¹⁵. Tujuan penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan antara masyarakat dan negara dalam kerangka berpikir Al-Farabi. Hasil penelitian Ini menjelaskan bahwa Pemikiran al-Farabi tertuang di dalam karya-karyanya yaitu dalam kitab al-Siyasah alMadaniyah dan dan kitab Ara“ ahl Al-Madinah Al-Fadilah yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi selanjutnya. Dua karya tersebut membahas tentang kehidupan bernegara mulai dari persyaratan pemimpin, kerjasama pemimpin dengan masyarakat, peran masyarakat dalam kehidupan bernegara, sampai kehidupan bersama antar masyarakat. Menurut al-Farabi masyarakat merupakan elemen penting dalam rangka terbentuknya negara. Dalam kehidupan berbangsa masyarakat justru harus ikut serta memberikan kontribusi sesuai dengan kapabilitas masing-masing.

Al-Farabi mengibaratkan peran masyarakat tersebut dengan anggota tubuh manusia. Setiap anggota tubuh memiliki fungsi dan kemampuan dan kesanggupannya. Demikian pula dengan negara, masing-masing rakyatnya mempunyai tugas dan kecakapan yang berbedabeda. Pemimpin memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bersama, tetapi tetap membutuhkan bantuan dan kerjasama yang baik dari orang lain. Oleh karena itu Al-Farabi menginginkan adanya kebebasan (al-hurryah) seluruh masyarakat agar bisa melakukan aktifitasnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tugas pemimpin hanya memberikan arahan agar sesuai dengan tuntunan agama dan tidak melenceng dari tujuan terbentuknya negara, yaitu tercapainya kebahagiaan (al-Sa“adah) dunia dan akhirat.

¹⁵ Kurniawati, P. (2018). Masyarakat dan Negara menurut Al-Farabi. *Jurnal El-Qanuny: JUrnal Ilmu-ilmu kesyariahan dan Pranata Sosial*, 4 (1), 101-115.

Pemikiran-pemikiran Al-Farabi tersebut muncul pada abad pertengahan, pada saat dunia mengalami kemunduran akibat dominasi gereja yang sangat tinggi sekalipun yang perlu dipahami bahwa demokrasi yang ada sekarang sudah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dan perkembangan peradaban manusia. Dengan kata lain, kalau dulu AlFarabi menawarkan pemikiran politik yang dianggap sebagai pondasi modern. Tetapi pemikiran Al-Farabi masih berada dalam pengaruh religiusitasnya sebagai pengaruh agama islam, hal itu terlihat dari pemikirannya tentang kebebasan. Misalnya, ia menganggap kebebasan (al-hurriyah) sebagai bagian dari al-Madinah al-Jahiliyyah, bukan al-Madinah alFadilah yang diidealkan olehnya. Tetapi hal ini ditafsirkan ulang oleh cendekiawan selanjutnya. Bahwa yang dimaksud kebebasan menurut al-Farabi tersebut adalah kebebasan yang tanpa batas.

Penelitian-penelitian diatas memiliki relevansi dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun point-point persamaan dalam penelitian diatas dengan penelitian yang diangkat peneliti yakni; a) menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah terkait penggusuran dilihat dari pandangan Hak asasi manusia. b) resilience, ketangguhan masyarakat. c) hubungan masyarakat dan negara. d) menjelaskan kerangka berpikir tentang hegemoni terkait dengan situasi yang dihadapi. e) gerakan sosial yang lahir dari masyarakat terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Maka penelitian ini berusaha melampaui penelitian yang telah dilakukan penelitian terdahulu. Artinya, penelitian ini bukan saja beriktihar untuk mengungkapkan tentang ketangguhan masyarakat dalam menghadapi tekanan yang di berikan pemerintah. Tetapi penelitian ini juga berupaya untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah kota Yogyakarta tahun 1983 terhadap Tindakan penggusuran yang dilakukan, yang dihubungkan dengan teori hegemoni Antonio Gramsci

G. Kerangka kosepsual

1. Gerakan Sosial

Dalam peta teori Ilmu Sosial tentang penjelasan konsep gerakan sosial memiliki beragam pemahaman, beberapa pakar sosiologi mengartikan gerakan sosial merupakan bentuk dari sebuah Tindakan kolektif. Dalam rana kepentingan yang berbeda perlawanan secara umum melahirkan sebuah istilah “perjuangan kelas”. Yang menggambarkan sebuah kelas yang dikuasai atau didominasi akan melakukan perlawanan dan mengambil alih kebijakan. Maka pemahaman gerakan sosial diantaranya sebagai berikut

Gerakan sosial atau *social movement* adalah sebuah aktivitas yang diorganisir yang ditunjuk sebagai sebuah Tindakan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial (*encourages or discourages social change*). (Macionis 1999: 607). Dari pemahaman ini dapat ditarik kesimpulan bahwa gerakan sosial yang dikemukakan oleh Macionis memiliki dua ciri khas utama, yakni; a) adanya gerakan yang diorganisir. Dan, b) memiliki tujuan yang berkaitan dengan perubahan sosial.¹⁶

Defenisi lain mengatakan bahwa gerakan sosial (*social movement*) merupakan upaya kolektif yang ditujukan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan baru (Spencer, 1982: 504). Pemahaman yang di tawarkan Spencer memiliki ciri utama yakni adanya upaya kolektif (bersama) yang ditujukan untuk terjadinya arah perubahan yang lebih baik dari yang sebelumnya¹⁷.

Pemikiran lainnya menyatakan bahwa Ketika suatu kelompok orang mengatur (mengorganisir) diri melalui upaya yang bertujuan mendorong dan menghambat

¹⁶ Sukmana, Oman.(2016) *konsep dan teori gerakan social*. Malang: Intrans Publishing

¹⁷ Oman, *Ibid*, hal. 4

atau menolak beberapa jenis perubahan sosial, maka kelompok itu sedang membuat suatu gerakan sosial, dengan menandakan sedikit atau banyaknya kemampuan politik yang dimiliki, kemudian mereka bergabung bersama-sama untuk mewujudkan atau mendapatkan beberapa hal yang diperjuangkan (Locher. 2002: 231 Dalam Oman 2016:4). Locher berpendapat bahwa Sebagian besar teoritis tentang perilaku kolektif (*collective behavior*) melihat gerakan sosial (*social movement*) sebagai bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*), tetapi banyak teori yang memandang bahwa gerakan sosial (*social movement*) merupakan fenomena yang terpisah dari perilaku kolektif (*collective behavior*)¹⁸

Sajatmiko menjelaskan bahwa gerakan sosial diartikan sebagai sebuah bentuk aksi kolektif dengan orientasi konflikutual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, yang dilakukan dalam konteks jaringan lintas kelembagaan yang berhubungan erat antar actor-aktor yang di ikat dalam rasa kebersamaan dan identitas kolektif yang kuat melampui bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye Bersama.¹⁹

Gerakan sosial menurut Sidney Tarrow ditandai dengan kelompok yang memiliki sebuah kesadaran diri untuk bertindak, perhatian untuk mengungkapkan apa yang dilihat sebagai klaim-klaim dengan menentang kelompok elit, rezim penguasa, atau juga kelompok lainnya. Menurutnya terdapat elemen-elemen yang menjadi bagian penting yang menjadi alasan keberadaan gerakan sosial yakni elemen gerakan sosial dalam konteks perlawanan adalah tentang upaya kolektif, tujuan bersama, solidaritas sosial, interaksi yang berkelanjutan dengan elit, lawan dan otoritas. Jadi dasar gerakan sosial merupakan perlawanan yang dilatar belakangi pada jaringan sosial dalam bingkai Tindakan kolektif dan selalu

¹⁸ Oman, *Ibid*, hal. 4

¹⁹ Oman, *Ibid*, hal. 6

mengembangkan kapasitas untuk mempertahankan apa yang menjadi tujuan bersama²⁰.

Menurut Singh (2001: 36-37) menjelaskan bahwa gerakan sosial merupakan sebuah bentuk mobilisasi dalam rangka menentang negara dengan system pemerintahannya, yang tidak selalu menggunakan kekerasan dan pemberontakan, bersenjata seperti halnya dalam kasus kerusuhan, pemberontakan, dan revolusi. Umumnya gerakan sosial menyatakan dirinta dalam kerangka demokratik.

Melihat berbagai penjelasan tentang gerakan sosial diatas, dpaat disimpulkan bahwa benang merah terhadap pengertian gerakan sosial pada beberapa hal yakni;

- a) Gagasan ideal ketimbang mengejar kepentingan material
- b) Berkaitan erat dengan perubahan menuju satu arah yang dianggap ideal oleh para penggeraknya.
- c) Menekankan pada segi kolektif dari suatu gerakan sosial, sedangkan diantara mereka ada yang menambahkan segi kesenjangan, organisasi, dan kesinambungan.

Beberapa pakar memposisikan gerakan sosial sebagai gerakan perubahan yang dilakukan secara kolektif untuk mencapai tujuan yang ideal. Gerakan sosial itu muncul karena adanya kesenjangan yang dilakukan oleh kelompok dominan atau yang berkuasa. Secara umum gerakan sosial diartikan sebagai sebuah entitas dinamika yang terkadang bersifat nonformal. Di samping itu ada yang meletakkan perhatian pada aksi dan upaya kolektif untuk mencapai tujuan bersama

²⁰ Mohammad, Syawaludin. (2017). *Sosiologi dan perlawanan, Studi perlawanan Repertoar petani di Rengas Ogan Ilir, Sumatra Selatan*. Yogyakarta: Deepublish, CV. Budi Utama.

dalam rangka perubahan, gerakan yang dilakukan diluar Lembaga-lembaga yang dianggap mapan.

Pandangan berbeda yang dijelaskan oleh Charles Tilly²¹ yang mendefenisikan bahwa gerakan sosial merupakan serangkaian aksi perlawanan yang secara terus menerus dilakukan dan mengatasnamakan kelompok yang dirugikan terhadap penguasa, dilakukan melalui berbagai bentuk protes Publik, termasuk Tindakan-tindakan diluar jalur partisipasi politik formal yang diatur dalam hukum dan perundangan, untuk menunjukkan bahwa kelompok tersebut solid, berkomitmen, serta mewakili jumlah yang signifikan.

Tilly menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan suatu yang terorganisir (*organised*), berkelanjutan (*sustained*), menolak *self-conscious* (*self-conscious challenge*), yang didalamnya terdapat kesamaan identitas (*shared identity*) diantara mereka yang terlibat didalamnya. Pada pemahaman ini Tilly menekankan bahwa dinamika kondisi secara keseluruhan yang akan menentukan keresahan bahkan kerusuhan sosial dan karakteristik-karakteristik yang ada, ketimbang gerakan dalam gerakan sosial dimana terdapat actor-aktor yang terorganisir secara spesifik.

Menurut Tilly unsur penting dalam gerakan sosial adalah kondisi hubungan pertentangan (*contention relation*). Tilly menjelaskan bahwa aksi kolektif merupakan aksi yang dilakukan kelompok yang dilakukan Bersama-sama demi mencapai tujuan Bersama. Tilly memetakan beberapa point penting yang dipakai sebagai dasar gerakan sosial, yakni;

1. Gerakan sosial adalah gerakan yang terorganisir

²¹ Charles Tilly dan Sidney Tarrow. 2015 Contentious Politics edition. Amerika: Press Universitas Oxford

2. Gerakan sosial selalu memiliki tujuan untuk membuat perubahan sosial atau mempertahankan suatu kondisi
3. Tindakan-tindakan dalam gerakan sosial merupakan Tindakan yang terorganisir
4. Tindakan dalam gerakan sosial merupakan Tindakan menentang secara berkelanjutan
5. Gerakan sosial melakukan klaim secara terbuka
6. Aksi perlawanan dalam gerakan sosial akan berlangsung secara terus menerus dan berulang
7. Gerakan sosial merupakan gerakan yang melestarikan politik perlawanan dan tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan secara langsung
8. Gerakan sosial berkembang dan bertahan karena memiliki solidaritas dan identitas gerakan

Berdasarkan penalaran pemahaman tentang gerakan sosial diatas, maka peneliti mengambil pemikiran yang dikonsepsikan oleh Charles Tilly dalam mengkaji focus penelitian di lapangan dengan topik “Gerakan sosial dan perubahan kebijakan (Study Tentang Gerakan Sosial Masyarakat Kampung Code, Kelurahan Kota Baru, Gondokusman dalam Menghadapi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 1983). Fenomena Tindakan perlawanan Masyarakat Kampung Code tidak hanya berfokus pada Tindakan perlawanan atau konflik saja, melainkan sebagai sebuah rentetan rangkaian dengan strategi dan taktik inovatif untuk mencapai tujuan.

Sejalan dengan konsep pemahaman-pemahaman diatas gerakan sosial (*social movement*) yang dikibarkan masyarakat Kampung Code merupakan sebuah bentuk gejolak sosial, sebuah aksi protes masyarakat terhadap Tindakan penguasa

yang dinilai semena-mena, yang akan menindas kehidupan mereka. Gerakan sosial ini berlangsung setelah pemerintah kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan penggusuran pemukiman kumuh yang ditempati masyarakat Kampung Code dengan alasan bahwa kampung Code berada di lokasi rawan bencana. Kebijakan ini dinilai menindas masyarakat Kampung Code sehingga masyarakat Kampung Code Bersatu secara Bersama-sama melakukan aksi penolakan, menentang kebijakan pemerintah 1983 seperti halnya menolak penolakan yang dilakukan Romo Mangunwijaya berupa mogok makan, sampai pada melakukan pertemuan dengan Emil Salim selaku Menteri lingkungan hidup, gerakanya bukan hanya sampai pada titik itu melainkan melakukan gerakan perubahan (gerakan akar rumput Masyarakat) mereka secara bersama sepakat untuk merubah diri dan lingkungan mereka ke arah yang lebih baik

Aksi lain yang dilakukan masyarakat Kampung Code seperti melakukan penghadangan terhadap alat berat yang masuk ke pemukiman warga, alat ini diperlukan untuk menggusur pemukiman warga di kampung Kali Code, kelurahan Kota Baru, Gondokusuman. tak hanya itu aksi masyarakat juga menutup akses masuk kampung dan menempelkan berbagai tulisan berupa penolakan masyarakat.

Aksi-aksi gerakan perlawanan dan perubahan masyarakat Kampung Code merupakan serangkaian bentuk gerakan sosial yang menentang kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai bentuk ketiadilan dan perilaku semena-mena pemerintah terhadap masyarakat Kampung Code. Masyarakat Kampung Code memperjuangkan hak-haknya, memperjuangkan hidup mereka yang dirampas pemerintah.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan produk aktivitas-aktivitas yang dimaksud untuk memecahkan masalah-masalah Publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh actor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu (Lemieux dalam Solichin A. Wahab 2014: 15)²²

kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Leo Agustino, 2006: 7)

kebijakan dalam arti peraturan perundang-undangan mempunyai beragam bentuk, di Indonesia sendiri kita melihat tiga jenis sumber pembuatan kebijakan Publik yakni; dibuat oleh legislatif, eksekutif dan legislative Bersama eksekutif (dan sebaliknya) (Riant Nugroho, 2009: 135)²³. Secara umum dikatakan bahwa kebijakan Publik tertinggi di Indonesia dibuat oleh Legislatif, yaitu Konstitusi (UU 45) dengan ketetapan MPR RI.

Penerapan kebijakan Publik akan lebih efektif jika ditentukan oleh sumber daya, struktur organisasi komunikasi, serta disposisi atau sikap. Adanya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, tersedianya struktur organisasi untuk melaksanakan kebijakan, komunikasi terkait dihubungkan pada organisasi atau Publik, sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat dan sumber

²² Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

²³ Nugroho, R. (2009). *Analisis kebijakan publik*. Jakarta: Gramedia.

daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. (Edward III 1980)²⁴

Penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari suatu sudut kemampuan secara nyata dalam meneruskan dan mengoprasionalkan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan hadirnya implementasi kebijakan dalam suatu bentuk nyata maka secara otomatis mendapatkan garansi dari terlaksananya program yang baik.

Tahap-tahap pembuatan kebijakan

Dalam tahapannya, pembuatan kebijakan mengikuti beberapa tahap demi tahap.

Proses ini merupakan yang yang paling penting agar melahirkan kebijakan yang baik dan dapat memecahkan masalah yang terjadi. Tahapan-tahapan pembuatan kebijakan meliputi;

a) Penyusunan Agenda Kebijakan

Tahap ini merupakan awal dari pembuatan kebijakan. Pada tahapan ini terdapat perumusan masalah guna mencari pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Hal ini membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan mendesain kebijakan baru

b) Formulasi kebijakan

Dalam tahap yang berikutnya ini, diperlukan suatu pemahaman yang dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang

²⁴ Edward III, George C, 1980. *Implementing Public Policy*. Washington:Congressional Quarterly Press

masalah yang terjadi mendatang sebagai Tindakan alternatif. Peramalan menguji masa depan yang potensial, secara normative bernilai, mengendalikan kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan (Sujianto, 2008: 38) ²⁵

c) Adopsi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan memasuki tahap seleksi kebijakan, pada tahap ini dilakukan rekomendasi terhadap alternatif yang akan di angkat yang melalui pendekatan pengetahuan yang relevan dengan prinsip-prinsip kebijakan. Rekomendasi sangat dibutuhkan untuk membantu etimasi tingkat nasional dan ketidakpastian, mengenal eksternalisasi dan ekibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan keputusan yang diadopsi, dan menentukan pertanggung jawaban administratif bagi implementasi kebijakan

d) Implementasi kebijakan

Pengambilan kebijakan berusaha melakukan chek atau pemantauan (monitoring) tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya atas dasar pengetahuan yang memadai dengan konsep-konsep tersebut. hal ini membantu menilai tingkat kepatuhan, menentukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan

²⁵ Sujianto. (2008). *Implementasi kebijakan publik: konseo, teori, dan praktik; studi implementasi perkebunan daerah transmigrasi di Riau*. Pekan Baru : Alaf Riau.

dan rintangan implementasi, dan menentukan titik-titik pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan

e) Evaluasi kebijakan

Ditahap yang terakhir yakni evaluasi dibutuhkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan hasil dari kebijakan. Tujuannya agar dapat membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses-proses pembuatan kebijakan, menyumbangkan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam mengatasi masalah (Tangkilisan, 2003: 49).

Hal yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan adalah melibatkan peran individu-individu, atau kelompok yang akan menjalankan kebijakan. Dengan artian pembuatan kebijakan tidak dibuat oleh pemerintah saja. Pemerintah sebagai badan atau Lembaga, dan individu atau kelompok sebagai orang yang akan menjalankan kebijakan itu, dan merekalah yang akan menilai tepat sasaran atau tidaknya kebijakan itu.

Kebijakan pengurusan yang dilakukan pemerintah Yogyakarta terhadap masyarakat Masyarakat Kampung Code, Kelurahan Kota Baru Kota Yogyakarta dalam Menghadapi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 1983 merupakan contoh kebijakan yang tidak merefleksikan kepentingan masyarakat. Kebijakan yang seharusnya memecahkan masalah malah melahirkan masalah baru yang berdampak besar kepada masyarakat. Pengambil kebijakan harus dituntut untuk bisa meramalkan masa depan atas kebijakan yang diterapkan, hal ini berfungsi untuk meminimalisir respon negatif masyarakat terhadap kebijakan

yang dibuat, agar masyarakat dapat menerima dengan baik kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Kebijakan penggusuran di Kampung Code sejauh ini mendapat penolakan dari masyarakat karena kebijakan pemerintah pada tahun 1983 dinilai semena-mena karena pembuatan kebijakan ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi dan sosial

Seharunya pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan yang tepat untuk mencegah terjadinya konflik penggusuran tersebut. hal ini dapat dilakukan diantaranya: *pertama*, sosialisasi. Sosialisasi ini berisi apa saja manfaat dari penggusuran yang dilaksanakan dan apa rencana pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak dari penggusuran tersebut. pada masyarakat yang kurang bisa menerima penggusuran ini sosialisai dilakukan dengan silaturahmi kepada tokoh-tokoh masyarakat dan diharapkan dapat sampai informasinya pada masyarakat pada umumnya. *Kedua*, ganti rugi. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar masyarakat tidak protes terhadap penggusuran tersebut. ganti rugi ini bisa dilakukan berupa kompensasi uang terhadap tanah sehingga masyarakat dengan senang hati meninggalkan lahannya dan menerima kompensasi yang layak. *Ketiga*, mufakat. mufakat adalah adanya kesepakatan antara warga yang terkena dampak dengan pihak pemerintah dalam hal penggusuran lahan. Selama ini masyarakat banyak yang tidak diajak dialog dan bermusyawarah dalam sengketa penggusuran lahan. Apabila diadakan musyawarah untuk mufakat diharapkan konflik tidak akan terjadi. Masyarakat tidak merasa dirugikan dengan adanya penggusuran dan pemerintah tidak mempunyai hambatan dalam pelaksanaan penggusuran. *Keempat*, Relokasi. Relokasi merupakan pemindahan tempat warga yang terkena dampak ke tempat

baru yang layak. Yang menjadi permasalahan adalah tempat baru yang menjadi relokasi warga biasanya masih minim dari fasilitas-fasilitas umum yang ada di tempat yang sebelumnya. Agar tidak muncul konflik maka pemerintah seharusnya memperhatikan kelayakan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

3. Hegemoni teori Antonio Gramsci

Konsep hegemoni dikembangkan oleh seorang filsuf Marxis Italia Antonio Gramsci (1891-1937). Tolak ukur awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah, bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas dibawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukan merupakan hubungan dominasi, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi consensus (Simon. 2004)²⁶

Kata hegemoni ini merupakan sebuah konsep karya pemikiran Antonio Gramsci (1891-1937) seorang pemikir sosial berkebangsaan Italia. Hegemoni berasal dari Bahasa Yunani kuno "*eugemonia*" yang diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (*polis atau city states*) secara individual, misalnya yang dilakukan oleh negara kota athena dan sparta terhadap negara-negara lain yang sejajar (patria dan arief. 2009:115)²⁷

Kepemimpinan menurut Marxis terjadi melalui dua cara yaitu melalui kekerasan dan kesetujuan. Kekerasan adalah cara mendominasi melalui penanaman kekuasaan dari kelas yang berkuasa terhadap pihak yang tertindas

²⁶ Simon, R. (. (2004). *Gagasan-gagasan Politik Gramsci* . Yogyakarta: INSIST dan Pustaka Pelajar.

²⁷ Patria & Arief, N. (2003). *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

dengan cara paksa, sedangkan persetujuan merupakan cara hegemoni, yaitu penanaman kekuasaan yang sama tetapi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan dari kelas yang dikuasai adalah penerimaan yang ikhlas dari kelas tersebut. Hegemoni menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara terhadap negara-negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam negara “pemimpin”. Dalam konteks politik internasional misalnya, pada periode perang dingin. Pertarungan pengaruh antara negara adikuasa seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet, pada masa perang dingin biasanya disebut sebagai perang untuk menjadi kekuatan hegemonik di dunia. Konsep Hegemoni Gramsci sebenarnya dapat dielaborasi melalui penjelasannya tentang basis dari supremasi kelas.

Supremasi sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara, sebagai “dominasi” dan sebagai “kepemimpinan intelektual dan moral”. Dan di satu pihak, sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok oposisi untuk “menghancurkan” atau menundukan mereka, bahkan mungkin dengan menggunakan kekuatan bersenjata; di lain pihak, kelompok sosial memimpin kelompok-kelompok kerabat dan sekutu mereka. Sebuah kelompok sosial dapat dan bahkan harus sudah menerapkan “kepemimpinan” sebelumnya memenangkan kekuasaan pemerintahan (kepemimpinan tersebut merupakan salah satu dari syarat-syarat utama untuk memenangkan kekuasaan semacam itu). Kelompok sosial tersebut kemudian menjadi dominan ketika dia mempraktekan kekuasaan, tapi bahkan bila dia telah memegang kekuasaan penuh di tangannya, dia masih harus terus “memimpin” juga”. (Gramsci, 1987;57-58)²⁸.

²⁸ Gramsci, A. (Yogyakarta). *Prison Notebook: Catatan-catatan dari penjara* (terj. Teguh Wahyu Utomo). 1987: Pustaka Pelajar

Kutipan ini jelas menunjukkan suatu totalitas yang didukung oleh kesatuan dua konsep: kepemimpinan (direction) dan dominasi (dominance). Gramsci (dalam Faruk, 2014:132)²⁹ mendefinisikan hegemoni sebagai “kepemimpinan” kata tersebut lebih sering digunakan oleh para komentator politik untuk menunjukkan pengertian dominasi. Akan tetapi bagi Gramsci, konsep hegemoni berarti sesuatu yang lebih kompleks. Gramsci menggunakan konsep itu untuk meneliti bentuk-bentuk politik, kultural, dan ideologis tertentu, yang ada dalam suatu masyarakat. Suatu kelas fundamental dapat membangun kepemimpinannya sebagai sesuatu berbeda dari bentuk-bentuk dominasi yang bersifat memaksa. Hegemoni memperkenalkan dimensi kepemimpinan moral dan intelektual yang tidak terdapat dalam bentuk-bentuk analisis Marxis yang lebih ortodoks dan mengindikasikan berbagai macam cara yang di dalam kepemimpinan itu sudah dibangun secara historis.

Gramsci meneliti jajaran fungsi-fungsi dan efek-efek dari strata yang ia istilahkan sebagai “fungsionaris” hegemoni, kaum intelektual, dan berbagai macam situs hegemoni pendidikan, berbagai macam bentuk kebudayaan tinggi dan populer, ideologi, kepercayaan-kepercayaan populer, dan common sense. Jika Marxisme Ortodoks sudah menekankan pentingnya peranan represif dari negara dan masyarakat-masyarakat kelas, Gramsci memperkenalkan “masyarakat sipil” untuk melokalisasikan cara-cara kompleks yang di dalamnya ada “kesetujuan” pada bentuk-bentuk dominasi diproduksi.

Menurut Gramsci (Ratna 2010:183)³⁰, ada tiga cara untuk membentuk gagasan yaitu: bahasa, pendapat umum (common sense), dan folklor. Bahasa merupakan

²⁹ Faruk. (2014). *Pengantar sosiologi Sastra. edisi Revisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

³⁰ Ratna, N. (2010). *Sastra dan Culture Studies*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

sarana utama dan dengan demikian berpengaruh besar terhadap penyebaran konsep dunia tertentu. Makin luas dan makin banyak bahasa yang dikuasai, maka makin mudahlah penyebaran ideologi yang dapat dilakukan. Pendapat umum bersifat kolektif. Meskipun tidak sistematis tetapi memiliki sifat pervasif yang cukup kuat. Pendapat umum tidak harus dilihat dalam kerangka pengertian yang negatif. Menurut Gramsci pendapat umum dan budaya pop telah menjadi arena penting dalam ideologi. Pendapat umum merupakan tempat dibangunnya ideologi, yang juga berfungsi untuk membangun dan melawan ideologi. Foklor yang pada umumnya meliputi kepercayaan, opini, tahayul juga berperan dalam menopang hegemoni, kekuatan yang berfungsi mengikat masyarakat tanpa kekerasan. Pada dasarnya hegemoni tidak dipaksakan dari atas, juga tidak berkembang secara bebas dan tidak disengaja, hegemoni diperoleh melalui negosiasi dan kesepakatan.

Bentuk hegemoni yang ditawarkan oleh Gramsci, yaitu kebudayaan, hegemoni, ideologi, kepercayaan populer, kaum intelektual, dan negara

a. Kebudayaan

Bagi Gramsci konsep kebudayaan lebih tepat, adil, dan demokratis adalah kebudayaan sebagai organisasi, disiplin batiniah seseorang, yang merupakan pencapaian suatu kesadaran yang lebih tinggi yang dengan sokongannya, seseorang berhasil dalam memahami nilai historis dirinya, fungsinya di dalam kehidupan serta hak-hak dan kewajibannya

b. Hegemoni

Menurut Gramsci (Faruk 2014:141) hegemoni adalah kriteria metodologis yang menjadi dasar studi-studinya didasarkan pada asumsi bahwa supremasi suatu kelompok sosial menyatakan dirinya dalam dua

acara, yaitu sebagai “dominasi” dan sebagai “kepemimpinan moral dan intelektual”. Hegemoni sering dikacaukan dengan ideologi. Hegemoni berasal dari akar kata hegeisthai (Yunani) berarti memimpin, kepemimpinan, kekuasaan yang melebihi kekuasaan yang lain. Jadi, secara leksikografis hegemoni berarti „kepemimpinan“. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari istilah tersebut biasanya dikaitkan dengan dominasi. Dalam hegemoni terkandung ideologi, tetapi belum tentu sebaliknya. Unsur represif misalnya, lebih jelas dalam hegemoni. Secara ringkas ideologi berarti sistem berpikir, secara luas ideologi juga dapat menunjuk pandangan dunia tertentu.

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat. Karena itu, hegemoni pada hakekatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan. Dalam hal ini Gramsci merumuskan konsepnya merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik, dimana filsafat dan praktik sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang. Dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perseorangan, yang kemudian dapat membentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik dan semua relasi sosial terutama dari intelektual dan hal-hal yang menunjukkan pada moral. Sehingga hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai kelas

diktator. Williams (dalam Patria dan Arief, 2015;121). Hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari lainnya. (Bellamy dalam Patria dan Arief, 2015;121).

c. Ideologi, kepercayaan, dan kebiasaan umum (*common sense*)

Mengkritik pengingkaran dimensi kesadaran oleh beberapa rekan sesama Marxisnya, Gramsci (Faruk 2014: 144) mengatakan bahwa kepercayaan populer dan gagasan-gagasan serupa itu adalah juga kekuatan material. Dalam hal ini yang terpenting bahwa gagasan-gagasan atau kepercayaan itu tersebar sedemikian rupa sehingga memengaruhi seseorang tentang dunia. Ada tiga cara penyebaran gagasan-gagasan atau filsafat tertentu itu, yaitu melalui bahasa, *common sense* dan folklor. Folklor meliputi sistem-sistem kepercayaan menyeluruh, tahayul-tahayul, opini-opini, cara-cara melihat tindakan tertentu dan segala sesuatu.

Bagi Gramsci setiap bahasa mengandung elemen-elemen suatu konsepsi mengenai dunia dan kebudayaan, akan benar pula apabila dikatakan bahwa dari bahasa seseorang dapat ditafsirkan kompleksitas yang lebih besar atau lebih kurang konsepsinya mengenai dunia (Faruk, 2015:145).

Gramsci (Faruk, 2015:145) mendefinisikan *Common sense* sebagai konsepsi tentang dunia yang paling pervasif tetapi tidak sistematis. *Common sense* mempunyai dasar dalam pengalaman populer tetapi tidak merepresentasikan suatu konsepsi yang terpadu mengenai dunia seperti halnya filsafat. Filsafat merupakan tatanan intelektual yang tidak dicapai

oleh agama dan Common sense. Lebih jauh lagi, Common sense seperti halnya agama yaitu bersifat kolektif

d. Kaum intelektual

Menurut Gramsci agar dapat mencapai hegemoni, ideologi harus disebarakan. Penyebaran itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui lembaga-lembaga sosial tertentu yang menjadi pusatnya, misalnya bentuk-bentuk sekolahan dan pengajaran, kematangan dan ketidakmatangan relatif bahasa nasional, sifat-sifat kelompok sosial yang dominan, dan sebagainya. Pusat-pusat itu mempunyai fungsionaris yang mempunyai peranan penting, yaitu kaum intelektual.

Plato dan Aristoteles (dalam Patria dan Arif, 2015:156) mengemukakan fungsi edukatif dari negara yang berkuasa sebagai penegak moral atas individu-individu. Untuk menjamin tegaknya moral, maka negara haruslah dipimpin oleh intelektual. Gramsci (dalam Faruk 2014:151) membagi kelompok intelektual menjadi dua, kelompok intelektual pertama disebut kelompok intelektual organik dan kelompok intelektual kedua disebut kelompok intelektual “tradisional”. Kedua kelompok tersebut terpisah, tetapi secara historis dapat saling bertumpang tindih. Bagi Gramsci (dalam Ratna 2010:184) intelektual tradisional adalah orang-orang yang mengisi posisi ilmiah, seperti sastra, ekonomi, hukum, dan sebagainya, termasuk mereka yang terlibat di sekolah, universitas, dan lembaga negara. Intelektual organik yaitu mereka yang merupakan bagian institutif perjuangan kelas. Oleh karena itu, Gramsci menyokong intelektual organik sebab terbuka memihak kelas tertindas.

e. Negara

Gramsci membedakan dua wilayah dalam negara yaitu dunia masyarakat sipil dan masyarakat politik, yang pertama penting bagi konsep hegemoni karena wilayah “kesetujuan”, “kehendak bebas”, sedangkan wilayah yang kedua merupakan dunia kekerasan, pemaksaan, dan interferensi.

Gramsci (dalam Faruk 2013:153) negara tidak hanya menyangkut aparat-aparat pemerintah, melainkan juga aparat-aparat hegemoni atau masyarakat sipil. Negara adalah kompleks menyeluruh aktivitas-aktivitas teoretis dan praktis yang dengannya kelas penguasa tidak hanya membenarkan dan mempertahankan dominasinya, melainkan juga berusaha memenangkan persetujuan aktif dari mereka yang diperintahnya.

Gramsci (dalam Patria dan Arif, 2015:134) masyarakat sipil (civil society) adalah faktor kunci untuk memahami perkembangan kapitalis, Gramsci melihat itu sebagai superstruktur yang mewakili faktor aktif dan positif dari perkembangan sejarah. Ia merupakan hubungan-hubungan budaya dan ideologi yang kompleks, kehidupan intelektual dan spiritual, serta ekspresi politik dari hubungan-hubungan itu menjadi fokus analisa yang lebih daripada struktur.

Dalam studi sastra teori hegemoni merupakan penelitian dalam kaitannya dengan relasi-relasi sastra dengan masyarakat, hubungan pengarang dengan masyarakat. Secara ringkas bagaimana kekuatan-kekuatan sosial dibangun di dalam teks sastra. Karya sastra tidak lagi berfungsi sebagai cermin pasif, cerita sebagai semata-mata memindahkan dari dan melalui kejadian sehari-hari

4. Resilience

Resilience didefinisikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk secara tepat waktu bertindak keadaan tidak stabil dan segera beradaptasi, mengatur diri, dan tetap aktif terlibat dalam merespon kondisi yang tidak menentu. (Leitch, 2017). Konsep ini mengandung 3 (tiga) dimensi utama yakni, kemampuan atau kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengelolah persoalan (*copying capacities*), kemampuan untuk menyesuaikan diri pada kondisi yang tidak menentu (*adaptive capacities*), dan kemampuan berubah demi menyesuaikan tuntutan kondisi yang juga berubah (*transformative capacities*). (Keck dan Sakdalporak, 2013: 5)³¹

Menurut *Climate Resilience and Social Change: Operational Toolkit*, dalam (Word Bank, 2011) Ketahanan sosial mengacu pada kapasitas suatu komunitas atau masyarakat untuk mengatasi dan beradaptasi dengan gangguan dan perubahan yakni kemampuan masyarakat untuk mengatur diri sendiri, menyesuaikan diri dengan tekanan, dan meningkatkan kapasitas mereka untuk belajar dan beradaptasi. Komunitas yang tangguh mampu merespon secara positif terhadap perubahan atau stres dan mempertahankan fungsi intinya. Orang-orang yang terkena dampak darurat sering kali merupakan penanggap pertama dan mitra paling kritis dalam rekonstruksi. Setiap upaya untuk membangun ketahanan harus mempertimbangkan faktor sosial, memanfaatkan pengetahuan dan jaringan lokal untuk mengelola dan mengurangi resiko. Komponen ini sangat penting untuk respon sebuah sistem dan pemulihan dalam kasus bencana alam. Populasi yang cepat tanggap dan sadar dengan stabilitas keuangan akan bereaksi lebih baik

³¹ Keck, M. &. (2013). What is social resilience? lesson learned and social ways forward. *Erdkunde*, 67(1), 5-19.

dalam situasi krisis daripada yang lemah, miskin dan tidak berpendidikan. Aspek yang berdampak pada ketahanan perkotaan adalah usia, pekerjaan, pendidikan, etnis, situasi, ekonomi, struktur keluarga, migrasi dan akses informasi

Resilience secara konsep merupakan bagian dari ketahanan sosial. yang memiliki hakikat dari ketahanan sosial yakni suatu kondisi yang dinamis dari suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan sosial dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang muncul dari dalam dan luar, secara langsung ataupun tidak yang mengancam membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan sosial. Resiliensi bisa diartikan sebagai cara seseorang atau sekelompok orang menghadapi permasalahan tanpa melakukan kekerasan.

Terdapat dua pandangan tentang ketahanan sosial, yakni; a) ketahanan sosial merupakan sebuah bagian integral dari ketahanan sosial, yang berada sama seperti ketahanan ekonomi, ketahanan politik, ketahanan budaya, dan ketahanan militer yang merupakan unsur penting pembentuk ketahanan sosial. ketahanan sosial adalah kemampuan komunitas (*local grassroot community*) dalam menganalisis, berjaga-jaga dan mengatasi perubahan sosial yang terjadi, sehingga masyarakat dapat konsistensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, b) ketahanan sosial suatu komunitas sering dikaitkan acapkali dikaitkan dengan kemampuannya mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi, politik yang mengelilinginya. Serta ketahanan sosial digambarkan dengan kemampuan bertahan di tingkat system local dari arus globalisasi dan desentralisasi. Ketahanan sosial merujuk pada kemampuan komunitas untuk menghindari atau mengelolah konflik,

mencari dan menemukan solusi, yang sejalan dengan perkembangan komunitas itu sendiri. Ketahanan sosial mencakup kemampuan diri untuk menggalang consensus dan mengatur sumber daya serta faktor dari luar yang dapat menjadi sumber ancaman, namun dapat diubah menjadi peluang. Jadi, ketahanan sosial merupakan produk interaksi dinamis antar faktor eksogen dan endogen, sehingga kemampuan tersebut menunjuk adanya aspek dinamis dan keseimbangan (*community homeostatic and dynamic*).

kemampuan dalam ketahanan sosial bukan hanya sekedar kemampuan bertahan tetapi terdapat unsur dinamik yakni kemampuan untuk segera Kembali pada kondisi semula atau bahkan lebih baik lagi. Ketahanan sosial bukanlah suatu akhir dari perjuangan tetapi lebih kepada sebuah proses dan dinamika di dalam masyarakat. Secara singkat definisi ketahanan sosial merupakan daya tahan suatu individu atau kelompok individu, dalam menghadapi tekanan perubahan serta mampu merubah ancaman dan tantangan menjadi peluang dan kesempatan

pada hakikatnya ketahanan sosial berpegang teguh pada azas kekeluargaan, yang didalamnya mengandung unsur kearifan, keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Azas ini mengakui adanya perbedaan. Perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kebersamaan, agar tidak perkembangannya tidak terjadi konflik yang akan menghancurkan. Karena pada dasarnya tujuan utama dari ketahanan sosial adalah untuk menghadapi tekanan, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. (ATHG) (Sadewo, 2020: 12) dengan demikian semakin kuat ketahanan maka dapat menjamin hidup atau survival dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Didalam kehidupan masyarakat terdapat sebuah “modal sosial” yang terdiri atas ikatan sosial (*social bonding*), jembatan sosial (*social bridging*), dan jaringan sosial (*social linking*). Ikatan sosial merupakan sebuah bentuk dan tingkat modal sosial dalam komunitas yang paling rendah, dengan hubungan sosial yang dibangun berdasarkan kesamaan identitas yang homogen atau berdasarkan ikatan parochial seperti keagamaan, kekerabatan, kesukuan) yang beriotensi eksklusif. Jembatan sosial merupakan bentuk modal sosial dalam komunitas lokaal yang lebih terbuka dan inskludif dan heterogen yang melewati ikatan parochial yang cocok untuk membangun kerukunan, perdamaian maupun kohesi. Sementara, jaringan sosial adalah modal sosial yang melampui komunitas local, berorientasi keluar dan berjejaringan lebih luas dengan dunia sekitar (Briggs, 1998; Woolock dan Narayan, 2000; Putnam, 2000; Portes dan Landolf, 2000; Woolock, 2001

Selain dari ketiga modal sosial diatas terdapat dua point yang tidak kalah penting yakni; solidaritas sosial dan Gerakan sosial. solidaritas sosial adalah sebuah bentuk kebersamaa, kesamaan dalam sebuah kelompok masyarakat, sedangkan Gerakan sosial yang terbentuk dalam sebuah organisasi masyarakat, organisasi ini dibentuk atas dasar rasa kebersamaan diantara masyarakat baik dalam berbagai level masyarakat atau kelas masyarakat yang menaruh rasa pada isu-isu Publik dan mengarah kepada kepentingan masyarakat. Sehingga Gerakan sosial ini menjadi pendorong atau motivasi bagi masyarakat

Faktor-faktor *I have, I am dan I can* merupakan faktor-faktor yang dapat membentuk resiliensi. Individu yang hanya memiliki satu factor dalam dirinya tidak dapat dikatakan sebagai individu yang resilien. Sehingga individu tersebut membutuhkan beberapa faktor lain yang mendukungnya untuk dapat dikatakan bahwa individu tersebut telah resilien, walaupun tidak berarti pula individu

tersebut harus mempunyai semua faktor untuk dikatakan sebagai individu yang resilien. Misalkan individu yang hanya memiliki kualitas harga diri tinggi pada dirinya (*I am*) akan tetapi tidak mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik dengan orang lain atau tidak mempunyai keterampilan dalam memecahkan masalahnya (*I can*) dan dalam hal ini individu tersebut tidak mempunyai orang-orang yang dapat membantunya berkomunikasi atau memecahkan masalahnya (*I have*), maka individu tersebut tidak dapat dikatakan sebagai individu yang resilien karna hanya memiliki satu faktor dalam dirinya. Karna itulah ketiga faktor tersebut harus saling berhubungan untuk dapat membentuk sebuah resiliensi pada diri seseorang (Desmita. 2005:230)³².

5. Governmentality

Apabila membicarakan *governmentality* maka sangat dekat dengan topik tentang kekuasaan, baik relasi maupun dampak yang diberikan oleh kekuasaan tersebut. Pendekatan *governmentality* merupakan sebuah pendekatan yang diperkenalkan oleh Michel Foucault. Menurut Foucault (1978a) *governmentality* adalah perluasan kekuasaan dalam bentuk *disciplinary power*. *Disciplinary power* adalah teknologi kekuasaan yang dijalankan untuk mendisiplinkan tubuh dan membuatnya menjadi patuh dan berguna, dengan kata lain *disciplinary power* lebih pada kekuasaan atas individu manusia sebagai subjeknya. Apabila, subjek *disciplinary power* adalah individu manusia, maka subjek *governmentality* adalah populasi (tubuh sosial). Dalam Penelitian ini, bentuk kekuasaan atas subjek populasi dan sumber daya pada *governmentality* berupa politik kekuasaan. Intinya. *governmentality* adalah perluasan model kekuasaan *disciplinary power*

³² Desmita. (2012). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

pada level negara, maka yang dibicarakan dalam *governmentality* pada penelitian ini adalah isu tentang produk kebijakan pemerintah dalam suatu negara dari pemangku kekuasaan dalam usaha mengontrol dan mengendalikan sumber daya dan populasi untuk kepentingan negara.

Dalam melihat kekuasaan, Foucault melihatnya dengan empat cara: pertama, kekuasaan tidak dipahami dalam pengertian hegemoni dan dominasi, tetapi dibentuk melalui relasi antar manusia yang sederajat serta memiliki kekuatan yang sama dan setara. Kedua, kekuasaan itu menyebar dimana-mana (*dispersed*) dan tidak dapat dilokalisasi. Dimana ada struktur dan relasi di sana ada kekuasaan. Ketiga, kekuasaan hanya dapat dioperasikan dalam bidang tertentu, tidak bisa digeneralisasikan. Keempat, kekuasaan dan pengetahuan memiliki relasi yang sangat kuat. Hal ini bertujuan untuk "mengendalikan dan menguasai masyarakat, termasuk menggunakan data untuk memperoleh manfaat atas kekuasaan memerintah (Sahdan, 2020). Foucault (2002) juga menambahkan bahwasanya, *governmentality* ini disebut juga sebagai *conduct of conduct* Artinya, negara mengatur tindakan atau perilaku masyarakat dengan cara menginternalisasikan penundukan itu agar ia menjadi populasi yang patuh. Sebagai bentuk rasionalisasi beroperasinya kekuasaan, *governmentality* dapat juga dipandang sebagai suatu cara yang sah dan benar dalam mengatur sesuatu, yakni populasi dan sumber daya (*the right manner of disposition of things*).

Sedangkan Tania Li (2012), memandang *governmentality* sejenis dengan hegemoni (teknologi untuk mengontrol populasi tanpa menggunakan kekerasan dan dominasi tetapi dengan memanipulasi konsensus). Menurut pemikiran Li, *governmentality* sama dengan hegemoni atau dominasi yang dinormalisasikan melalui konsensus, bukan sebagai teknik dalam relasi kekuasaan. Relasi

kekuasaan itu terdapat dalam setiap relasi sosial, kekuasaan tidak memusat dan tidak pula dimiliki, tetapi ia tersebar: bukan karena merengkuh segalanya tetapi karena ia berasal dari manapun (Kamahi, 2017). Relasi dominasi mengandaikan bahwa subjek subordinat memiliki pilihan tindakan yang sangat terbatas, dan ia tidak memiliki pilihan lain selain yang dikehendaki kelompok dominan. Sedangkan relasi kekuasaan memberikan banyak kemungkinan pilihan tindakan. *Conduct of conduct* bukan bagaimana tindakan seseorang mempengaruhi tindakan orang lain, melainkan adanya suatu tindakan tertentu dapat menghadirkan ranah pilihan tindakan yang sangat terbuka tetapi ia sendiri memilih tindakan yang sebenarnya dikehendaki oleh negara (Foucault, 2002)

Dalam konteks kekuasaan atas populasi dan sumber daya, pemerintah memiliki kekuasaan mengatur itu kedua hal tersebut. Dalam mengupayakan memperbaiki keadaan suatu wilayah, dibuatlah suatu kebijakan yang mengatur hal tersebut. Kehendak untuk memperbaiki tersebut terletak pada ranah kekuasaan yaitu pemerintah. Menurut Foucault (2002) kehendak untuk memperbaiki disebut dengan kepengaturan. Kepengaturan atau kepengaturan perilaku merupakan sebuah upaya untuk mengarahkan perilaku manusia dengan serangkaian cara yang telah dikalkulasikan sedemikian rupa. Kepengaturan memiliki kepentingan untuk orang banyak. Dalam konteks pemerintah, kepengaturan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, memperbaiki keadaan hidup dan peningkatan kemakmuran. Dalam merumuskan tujuan tersebut, Foucault menyatakan perlunya rasionalitas khas kepengaturan. Rasionalitas khas kepengaturan berupaya untuk merumuskan jalan yang tepat untuk menata kehidupan manusia, dan disini dibutuhkannya kalkulasi. Kalkulasi sangat dibutuhkan karena kepengaturan harus

dijabarkan dengan tak-tik "cara yang tepat", diprioritaskannya tujuan "hasil akhir" dan demi tercapainya tujuan yang "optimal" (Li, 2012).

Untuk membuat suatu kebijakan, pendekatan *governmentality* memiliki dua praktek pokok, pertama adalah problematisasi dan kedua adalah teknisalisasi permasalahan. Praktek problematisasi merupakan sebuah upaya salam mengenali masalah dan pengenalan berbagai Kekurangan yang harus dibenahi Sedangkan untuk teknisalisasi masalah yakni serangkaian praktek yang menampilkan kehendak yang diatur sebagai suatu ranah yang mudah dimengerti, tegas cakupannya, dan jelas ciri- cirinya. Problematisasi dan teknisalisasi permasalahan tidaklah dua praktek yang terpisah, karena kedua praktek ini akan terlihat bersamaan saat melakukan kehendak untuk memperbaiki, dan dituangkan dalam bentuk kepengaturan. Kepengaturan dari pemerintah atas sebuah masalah akan diturunkan pada sebuah kebijakan, dan kebijakan tersebut haruslah berpijak pada dua praktek ini.

Berkaitan dengan kebijakan pengusuran kampung Code pada tahun 1983, dalam menyelesaikan permasalahan kewilayaan pada saat itu, pemerintah haruslah melakukan problematisasi terlebih dahulu. Contohnya adalah mengenali permasalahan yang ada dikampung Code yang diawali dengan dengan melakukan survei dan melihat solusi yang bisa ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan. Lalu, pemerintah melakukan teknisalisasi permasalahan berupa merumuskan, melihat opsi- opsi, lalu rekomendasi akan kepengaturan. Pada akhirnya, hasil dari praktek teknisalisasi permasalahan tersebut adalah kebijakan yang sesuai dengan kepentingan pemerintah. Kenyataannya, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atas populasi dan sumber daya, tidak mampu melakukan problematisasi masalah dan teknisalisasi masalah. Karena hal ini, seringkali

terjadi paradoks dalam sebuah kebijakan pemerintah pada saat itu. Permasalahan yang sering terjadi dalam praktek teknikalisis permasalahan adalah kerap diabaikannya persoalan relasi kuasa, kepentingan dan kecenderungan politik, keterbatasan akses akan sumber daya yang kesemuanya sangat bersinggungan dengan masalah politik. Mengambil contoh dalam kebijakan pemerintah Yogyakarta 1983, pemerintah mengarahkan pembangunan bersifat kesejahteraan wilayah, dengan menggunakan alasan untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi, secara rasional pemerintah melihat bahwa kemakmuran rakyat dilihat dari pembangunan kawasan, bukan pada rakyat tersebut. Selanjutnya, teknikalisis permasalahan yang dilakukan oleh pemerintah cenderung dibaca secara teknokratis, tetapi tidak melihat dampak yang diberikannya. Hal ini bisa dilihat pada kebijakan Penggusuran pemerintah Yogyakarta tahun 1983 hanya dibaca secara geografis saja, tidak menyinggung bagaimana ekonomi, dan sosio kultural kepada masyarakat Kampung Code.

Kesimpulan dari penjabaran diatas adalah *governmentality* merupakan pendekatan yang melihat perspektif pemerintah dalam melakukan pengaturan untuk kehendak memperbaiki. *Governmentality* adalah perluasan model kekuasaan *disciplinary power* pada level negara, maka pemerintah berusaha untuk mengontrol dan mengendalikan sumber daya dan populasi untuk kepentingan negara. Usaha dalam mengontrol tersebut dinamakan kepengaturan, dan dalam kepengaturan tersebut berupaya untuk memperbaiki masalah dalam suatu wilayah, yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Terdapat dua praktik dalam kepengaturan tersebut, pertama problematisasi permasalahan dan kedua adalah teknikalisis permasalahan. dan keduanya membutuhkan kalkulasi agar permasalahan diselesaikan dengan taktik "cara yang

tepat", diprioritaskannya tujuan "hasil akhir" dan demi tercapainya tujuan yang "optimal. Melihat hubungan antara perspektif pemerintah dalam melakukan teknikalisis permasalahan dengan pendekatan *governmentality*, terlihat bahwa penyelenggara negara sebetulnya tidak bekerja untuk melayani masyarakat, termasuk membuat kebijakan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan kekuasaan itu sendiri. Oleh karena itu, disinilah terjadi paradoks dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dimana pemerintah menyatakan kepengaturan dilakukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, pada nyatanya malah menimbulkan suatu masalah baru akibat kepengaturan tersebut.

Dalam penelitian ini prespektf *Governmentality* di adopsi untuk mengetahui beberapa point yang dikembangkann peneliti, yang meliputi, *Pertama* memahami Rasionalitas pemerintah Kota Yogyakarta dalam kebijakan tahun 1983, dan Masyarakat Kampung Code. *Kedua*, Menelaah Tak-tik dalam Gerakan social Masyarakat Kampung Code, *ketiga* tujuan dari gerakan social masyarakat Kampung Code

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan karakteristik objek penelitian berupa berbagai peristiwa di masa lampau, maka metode penelitian ini menggunakan metode Historis dengan pendekatan Kualitatif. Yakni metode yang berusaha untuk mengkaji peristiwa-peristiwa di masa lampau, mendeskripsikan serta menganalisa fakta-akta tersebut secara mendalam. Metode Historis yaitu, metode penelitian yang meliputi pengumpulan data dan penafsiran gejala peristiwa yang timbul dimasa lalu yang menggambarkan secara kritis seluruh kebenaran kejadian atau fakta untuk

membantu mengetahui apa yang harus dikerjakan dimasa datang Surakhmad, (2003:131)³³.

Metode historis ini mempunyai ciri khas yakni periode waktu yang bermakna bahwa kegiatan peristiwa, karakteristik, nilai- nilai, kemajuan bahkan kemunduran, dilihat dan dikaji dalam konteks waktu (Sjamsuddin 2007: 14)³⁴ mengartikan metode sejarah atau historis sebagai suatu cara bagaimana mengetahui sejarah, Penelitian ini menggunakan metode historis karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan sejarah khususnya mengenai Gerakan sosial dan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 1983 Selain itu metode ini dipilih karena tema yang menjadi kayan dalam penulisan skripsi ini berhubungan dengan Gerakan Sosial Masyarakat Kampung Code, Kelurahan Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta dalam Menghadapi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 1983

Selain itu, metode historis dipilih juga karena merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau dan menuliskan hasil berdasarkan fakta yang telah diperoleh disebut historiografi (Gottschalk, 1985 32) Pernyataan tersebut sama dengan pendapat Garragan bahwa metode sejarah merupakan seperangkat aturan yang sistematis dalam mengumpulkan sumber sejarah secara efektif, melakukan penilaian cara kritis dan mengajukan.

2. Unit analisis

a. Objek penelitian

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh

³³ Winarno Surakhmad. 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung, Tarsito.

³⁴ Syamsudin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Penerbit Ombak

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017)³⁵.

Objek penelitian ini yaitu Kampung Code, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Subjek penelitian

Dalam memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) dan dengan cara deskripsi pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan informan yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain dari subjek penelitian adalah informan yaitu orang yang memberi informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Subjek penelitian ini adalah tokoh masyarakat Masyarakat Kampung Code, Pemerintah Kelurahan, dan Saksi sejarah Gerakan sosial paada tahun 1983 yang terkait Pemilihan narasumber dilakukan dengan cara memilih informan dengan teknik Snowball. Teknik snowball sampling yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2017: 218-219)³⁶

Terdapat 5 (Lima) informan dalam penelitian ini yakni aktor Pemerintah Kelurahan Kotabaru (satu orang) dan masyarakat kampung code (empat orang)

³⁵ Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitaif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta

³⁶ Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitaif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta

Tabel 1.1 Data Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	usia	Pendidikan	Keterangan/Pekerjaan
1.	Urai Herman	Laki-Laki	42	S2	lurah
2.	Watno	Laki-laki	62	SD	Masyarakat/Buruh
3.	Darsono	Laki-laki	69	SD	Masyarakat/Linmas
4.	Mayun	Laki-laki	65	SD	Masyarakat/Buruh
5.	Mutiah	Perempuan	56	SMP	Ketua RT 01

Sumber: hasil Wawancara peneliti

c. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kampung Code, Kali Code, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Peneliti melakukan observasi di , Kampung Code, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah untuk menyajikan gambaran realistik tentang perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu mengartikan perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu atau mengetahui secara gambaran umum terkait fenomena yang terjadi sesuai dengan topik yang diteliti. Melalui observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema

dan masalah yang dikaji dalam penelitian (Nugrahani, 2014:132)³⁷. Ratcliff menyatakan bahwa ada beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian. Bentuk observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada observasi ini, peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa observasi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan suatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pendekatan partisipasi, melihat, mendengar, dan mencermati objek penelitian yang berhubungan dengan fenomena penggusuran di kali code terlebih khusus tentang resilience masyarakat Kampung Code dalam menghadapi Tindakan penggusuran oleh pemerintah

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide interview) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Saeful, 2009:

³⁷ Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan*. Surakarta: CV. Djiwa Amarta Press.

6-7)³⁸. Pertanyaan dalam wawancara mendalam tersebut pada umumnya disampaikan secara spontan. Hubungan antara pewawancara dan yang diwawancarai adalah hubungan yang dibangun dalam suasana biasa. Sehingga pembicaraan berlangsung sebagaimana percakapan sehari-hari, yang tidak formal.

Menurut Yuni (2000), wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang esensial dalam studi kasus. Wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan dengan lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, dan tidak dalam suasana formal. Wawancara ini dilakukan berulang pada informan yang sama dengan pertanyaan berbentuk open-ended yaitu pertanyaan tentang fakta dari peristiwa atau aktivitas dan opini. Adapun narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan Paguyuban Masyarakat Kampung Code Mandiri (PMKCM)

c. Dokumentasi

Selain melalui observasi dan wawancara, informasi atau data juga dapat diperoleh melalui dokumentasi. Dokumentasi sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2018). Hal ini bermaksud untuk mendapatkan data secara terperinci dengan melihat dan mencatat dengan gambar atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga peneliti dapat memanfaatkan data baik dokumen tertulis maupun tidak tertulis seperti gambar dan alat elektronik sebagai bahan untuk menghimpun dan menganalisis data. Dokumen-dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian.

³⁸ Rahmat, P. S. (n.d.). *Penelitian Kualitatif (Jurnal Equilibrium vol,5 No. (2009); 1-8.*

d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016).

4. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah proses mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalan data dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video/audio, pengambilan foto atau film. Sedangkan data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dan arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

a. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2016), reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan kata lain, peneliti merangkum kembali data-data untuk memilih dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran yang jelas mengenai governing dalam pembuatan peraturan pemerintah. Governing mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Gagasan ideal yang digunakan dalam konteks penelitian ini

adalah perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Menurut Eko (2014: 128)

b. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori. Hal yang paling penting digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016).

Menurut Ahmad Rijali (2018),³⁹ mengatakan bahwa penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c. Penarikan kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh di lapangan, maka dapat diambil suatu kesimpulan hasil akhir penelitian tersebut.

³⁹ A, R. (2018). Analisis Data Kualitatif. *UIN Antasari Banjarmasin* 17 (33), 81-95.

BAB II

GAMBARAN UMUM, DAN PROFIL KOTA YOGYAKARTA

A. Profil Kota Yogyakarta

1. Sejarah Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta secara administratif merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kota Yogyakarta dibangun atas dasar perjanjian Gianti pada tanggal 13 Februari 1755 dan di tandatangi langsung oleh kompeni Belanda yakni atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Dengan isi perjanjian yang menyatakan bahwa negara Mataram dibagi menjadi dua berupa hak kerajaan Surakarta dan Hak Pangeran Mangkubumi. Isi perjanjian itu pula menyatakan bahwa Pangeran Mngkubumi menjadi Raja Atas setengah daerah pedalaman kerajaan Jawa dengan pangkat Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidi Panatagama Khalifatullah.

Setelah perjanjian Gianti selesai Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I kemudian menetapkan Daerah Mataram sebagai Daerah kekuasanya diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta), Penetapan in disahkan pada tanggal 13 Maret 1755. Kota Yogyakarta berdiri tepat bersamaan dengan berdirinya kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengkum Buwono I di hutan beringin, suatu Kawasan di sungai Winongo dan Sungai Code dimana wilayah ini dilihat sangat strategis dikaji dari segi pertahanan dan keamanan pada saat itu.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dari Presiden Republik

Indonesia tepatnya pada tanggal 5 September 1945. Beliau mengeluarkan Amanah yang menyatakan bahwa Daerah kesultanan dan Daerah Pakualaman merupakan daerah istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia

a. Visi dan Misi Kota Yogyakarta

Visi

Visi Kota Yogyakarta yaitu, Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing untuk keberdayaan masyarakat yang berpijak pada nilai keistimewaan

Misi

Adapun Misi Kota Yogyakarta yaitu, *Pertama*, Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat. *Kedua*, Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing kota Yogyakarta. *Ketiga*, Mempekuat moral, etika, dan budaya masyarakat kota Yogyakarta. *Keempat*, Meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan, sosial, dan budaya. *Kelima*, Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan. *Keenam*, Membangun sarana dan prasarana Publik dan pemukiman. Dan *Ketujuh*, Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih.

b. Geografis

Kota Yogyakarta merupakan Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan daerah tingkat II satu-satunya yang berstatus kota di samping daerah tingkat II lainnya yang bestatus kabupaten. Secara geografis Kota Yogyakarta berada di tengah-tengah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara keseluruhan luas wilayah kota Yogyakarta yaitu 32,5 Km² atau luas wilayah kota Yogyakarta 1,025% dari luas wilayah propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. Dengan luas Wilayah ini maka Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT. Serta jumlah penduduk 428.282 jiwa hal ini memungkinkan kepadatan rata-rata 13.177 Jiwa/Km². Adapun letak dan batas wilayah kota Yogyakarta disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel II.1 Batas Wilayah

No	Wilayah	Batas
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Sleman
2.	Sebelah Selatan	Kabupaten Bantul
3.	Sebelah Timur	Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman

Sumber: BPS Yogyakarta (Dalam angka 2022)

Tabel di atas menunjukkan bahwa letak Kota Yogyakarta dapat dibidang sangat strategis karena berada di tengah antara dua Kabupaten, yakni Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman yang merupakan Bagian dari Kabupaten yang berada dibawah naungan Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. Letaknya yang cukup strategis, dapat memudahkan dalam menjalankan segala urusan untuk menunjang kemajuan dan perkembangan Kota Yogyakarta. Dengan kenyataan ini, Kota Yogyakarta dapat melakukan skema kerjasama antarKabupaten/Kota untuk mengembangkan

pembangunan. Misalnya, dalam hal pembangunan untuk kemajuan Masyarakat dan Pemerintah

c. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan potensi yang sangat menentukan maju mundurnya perkembangan suatu wilayah. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Dalam hal ini, penduduk merupakan aktor perencana dan pelaksana pembangunan. Oleh karena itu, penduduk merupakan unsur yang harus mendapatkan perhatian baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data penduduk Kota Yogyakarta tahun 2022, diketahui bahwa jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi yaitu 376.324 jiwa. Selain itu, Berikut adalah tabel yang menunjukkan penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin

Tabel II.2 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1.	Laki-laki	183.251	48,69
2.	Perempuan	193.073	51,30
Total		376.324	100

Sumber: BPS Yogyakarta (Dalam angka 2022).

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Yogyakarta hampir berimbang. Meskipun demikian kita masih mendapati gambaran bahwa kuantitas perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Dengan kalimat lain, penduduk Kota Yogyakarta didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Akan tetapi, kuantitas tidak berbanding lurus dengan kualitas. Artinya, meskipun secara kuantitas, penduduk berjenis kelamin mendominasi penduduk berjenis kelamin laki-laki, itu tidak menjamin kualitas perempuan. Hal ini terjadi karena dalam banyak hal, perempuan masih tertinggal jauh dari laki-laki. Misalnya, kaum perempuan seringkali mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan, mengembangkan keterampilan, kesempatan kerja, mengakses ruang publik seperti musyawarah kalurahan. Semua keterbatasan yang ada pada perempuan sebetulnya berangkat dari akar persoalan yang sama yaitu budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

2. Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jumlah penduduk kota Yogyakarta dilihat dari lapangan pekerjaan dengan umur 15 tahun

Tabel II.3. Penduduk berumur 15 Tahun ke atas berdasarkan lapangan pekerjaan

NO.	Pekerjaan	Laki-Laki	(%)	Perempuan	(%)	Jumlah
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	478	0,39	286	0,26	764
2	Pertambangan, dan penggalan	198	0,16	0	0,00	198
3	Industri pengeelolah	19.156	15,69	14.516	13,23	33.675
4	Pengadaan listrik, dan gas	363	0,30	233	0,21	596

5	Pengelola air, san sampah	214	0,18	216	0,20	431
6	konstruksi	7.627	6,25	816	0,74	8.447
7	Perdagang besar, dan eceran	22.806	18,67	32.749	29,84	55.565
8	Tranportasi, dan pergudangan	13.269	10,87	536	0,49	13.805
9	Penyedia akomodasi dan konsumsi	20.588	16,86	26.023	23,71	46.611
10	Informasi, dan komunikasi	1.777	1,46	653	0,59	2.430
11	Jasa keuangan dan asuransi	1.857	1,52	1.017	0,93	2.874
12	<i>Real estate</i>	332	0,27	0	0,00	332
13	Jasa perusahaan	6.380	5,22	2.682	2,44	9.062
14	Administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan social wajib	5.785	4,74	3.704	3,37	9.489
15	Jasa pendidikan	8.339	683	10.299	9,38	18,638

16	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	2.284	1,84	4.950	4,51	7.198
17	Musisi angklung	108	0,09	18	0,02	126
18	Jasa lainnya	10,598	8,68	11.005	10,07	21.778
	Jumlah	122.123	100	109.753	100	231.876

Sumber: BPS Yogyakarta (Dalam angka 2022)

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang bekerja dengan umur Minimal 15 tahun dengan melihat lapangan pekerjaan utama sangat bervariasi hal ini juga menggambarkan bahwa penduduk kota Yogyakarta merupakan Kota Sub-Urban. Mayoritas penduduk Kota Yogyakarta memiliki pekerjaan utama sebagai pekerjaan pedagang dan eceran besar dengan jumlah pekerja Laki-laki sebesar 22.806 jiwa (18,67%), dan perempuan 32.749 jiwa (29,84%) dengan total keseluruhan 55.565 jiwa. Kemudian pada lapangan pekerjaan terkecil di duduki oleh musisi angklung dengan Jumlah pekerja laki-laki sebesar 108 jiwa (0,09%), dan pekerja perempuan sebesar 18 jiwa (0,02%) dengan total keseluruhan 126 Jiwa. Hal ini menjadi perhatian pemerintah Kota Yogyakarta dan berharap adanya lapangan pekerjaan baru yang harus dikelola dan diberi fasilitas

3. Jumlah penduduk berdasarkan Usia

Tabel II.4. Penduduk berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)
1.	0-14	72.448	21,46
2	15-64	265.127	78,53
3	65>	35.749	10,58
	Total	337.575	100

Sumber: BPS Yogyakarta (Dalam angka 2022)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang sangat memadai untuk menopang pembangunan kalurahan. Penduduk Kalurahan Banguntapan yang berusia 15-64 tahun dapat dikatakan usia yang produktif karena usia ini dapat menopang pembangunan Kota Yogyakarta dengan jumlah 265.127 dengan presentase 78,53%

Bermodalkan jumlah diatas, maka cita-cita untuk menjadikan Kota Yogyakarta sebagai entitas yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengembangkan pola pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah pola pembangunan yang menekankan keterlibatan semua elemen masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap evaluasi kegiatan. Singkatnya, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan

4. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel II.5 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)
1.	Tidak Sekolah/Belum Bersekolah	1.760	0,51
2.	Tidak/Belum Tamat SD	16.299	4,78
3	SD/MI/Sederajat	32.628	9,57
4.	SLTP/MTs	56.028	16,43
5.	SLTA/Kejuruan/Sederajat	158.620	46,54
6.	Diplomat I/II/III/Sarjana Muda	20.369	5,97
7.	Tingkat sarjana/Doktor/Ph.D	55.121	16,17
Total		340.825	100

Sumber: BPS Yogyakarta (Dalam angka 2022)

Data di atas menunjukkan bahwa sebetulnya, secara kuantitas, sumber daya manusia di Kota Yogyakarta cukup memadai untuk menyokong pembangunan. Namun, kuantitas ini tidak dibarengi oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kota

Yogyakarta Kota Yogyakarta masih sangat rendah. Dengan kenyataan ini, maka program pembangunan di Kota Yogyakarta mesti diarahkan untuk pembangunan sosial (pembangunan non-fisik). Pembangunan sosial ini bisa diaplikasikan melalui skema pemberdayaan masyarakat misalnya mengeluarkan program-program pendidikan baik formal, informal, maupun non-formal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas masyarakat sehingga dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan di Kota Yogyakarta

d. Kondisi Sarana Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel II.6 Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)
1.	Gedung Sekolah TK	221
2.	Gedung Sekolah SD	165
3.	Gedung Sekolah SMP	58
4.	Gedung Perguruan Tinggi	43
Jumlah		487

Sumber: BPS Yogyakarta (Dalam angka 2022)

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Kota Yogyakarta sudah memadai untuk menyokong pengembangan dan peningkatan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat. Jika sarana dan prasarana pendidikan ini dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, maka kualitas sumber daya manusia di Kota Yogyakarta akan semakin meningkat. Oleh karena itu, masyarakat Kota Yogyakarta mesti memperoleh akses pendidikan yang layak.

2. Sarana dan prasarana Kesehatan

Berikut adalah tabel yang menunjukkan kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Kota Yogyakarta.

Tabel II.7 Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)
1.	Posyandu	623
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	3
3.	Rumah Sakit Swasta	9
4.	Rumah Sakit Khusus	10
5.	Klinik dan Praktek Dokter	381
Total		1.026

Sumber: BPS Yogyakarta (Dalam angka 2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Kota Yogyakarta sangat memadai demi menjamin kesehatan masyarakat. Hal ini ditandai dengan keberadaan berbagai sarana Kesehatan, seperti yang tertera diatas. Dengan begitu, keluhan masyarakat tentang kesehatan bisa terjawab dan teratasi. Unit-unit Kesehatan diatas berfungsi untuk melayani keluhan masyarakat tentang Kesehatan

3. Sarana dan prasarana Tempat Ibadah

Berikut adalah tabel yang menunjukkan kondisi sarana dan prasarana ibadah di Kota Yogyakarta

Tabel II.8 Sarana dan Prasarana tempat Ibadah

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	542
2.	Mushola/Langgar	512
3.	Gereja (protestan)	52
4.	Paroki (khatolik)	7
5.	Stasi (khatolik)	1
6.	Pura (hindu)	1
7.	Sanggar (Hindu)	0
8.	Vihara (Buddha)	4
9.	Cetiya (Buddha)	1
10.	Klentheng (Buddha)	1
11.	Klentheng (Konghucu)	1
Total		1.122

Sumber: BPS Yogyakarta (Dalam angka 2022)

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana ibadah di Kota Yogyakarta terbilang cukup memadai untuk menyokong masyarakat menjalankan ritual keagamaan. Sarana dan prasarana ibadah yang terdapat di Kota Yogyakarta sudah cukup memadai untuk mengakomodasi kepentingan ibadah masyarakat yang memeluk agama Islam, Katolik, dan Hindu.

B. Profil Kelurahan Kota Baru

Kelurahan Kota Baru merupakan salah satu Kelurahan yang berada di bawah naungan Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Kelurahan Kota Baru di bagian Utara dibatas oleh Kelurahan Terban, sebelah selatan berbatasan dengan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan. Sisi timur berbatasan dengan Kelurahan Klitren, Kecamatan Gandakusuman, dan Dibagian Barat berbatasan dengan Kelurahan Gowongan, kecamatan Jetis. Penamaan Kota baru di kelurahan ini karena bertumpu pada realitas pembangunan hunian padar dan penataan lingkungan yang baru untuk masyarakat

belanda. Istilah “Kota” mengacu pada perencanaan wilayah yang berpegang pada konsep Garden City, dengan langgam bangunan Indis.

Kelurahan Kota Baru memiliki Visi “terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang jujur, adil, dan Transpparan’ dengan point Misi yakni pertama, mewujudkan pelayanan kepada Masyarakat yang jujur adil dan Trasnparan. Kedua, mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan bersih. Keempat, mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman dan tertib. Dan kelima, mewujudkan kelurahan yang berbudaya. Dari pencacahan Visi dan Misi diatas dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Kota Baru mengedepankan pemerintahan yang berpegang teguh pada kejujuran, pemerintahan yang bersih, tranparan dan adil kepada masyarakatnya,

Jumlah penduduk kota baru tercatat berjumlah 3.075 dengan perincian jumlah penduduk laki-laki berjumlah 1.497 dan penduduk dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 1.578. dari jumlah penduduk laki-laki dan perempuan ini dapat dilihat bahwa jumlahnya berimbang. jumlah penduduk Kelurahan Kota Baru yang belum produktif berjumlah 752 jiwa, Produktif berjumlah 2.182 jiwa, dan yang yang tidak produkif berjumlah 241 jiwa. Dari data ini dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang produktif di kelurahan Kota Baru lebih mendominasi, dengan ini dapat mempercepat laju pembangunan Kelurahan Kota Baru. Dari jumlah ini Masyarakat kelurahan Kota baru mayoritas beragama Islam dengan jumlah 2.350, kemudian penduduk yang beraga Kristen dengan jumlah 329, kemudian penduduk beragama Katolik yang berjumlah 386.

C. Gambaran Umum Kampung Code

1. Sejarah Pemukiman kampung Code

Dulunya Pemukiman kampung Code merupakan bantaran sungai yang dijadikan sebagai hamparan hijau. Dikarenakan lokasi yang sangat atrategis dekat dengan pusat perekonomian, wisata, dan lapangan kerja dan sebagai pertemuan tiga pasar (pasar Bringharjo, pasar Krangganm dan pasar Demangan) hingga pada saat itu membuat bantaran Code dimanfaatkan tempat tinggal oleh masyarakat kaum Urban yang ingin menggantungkan nasibnya di Ibu Kota semakin bertambah, namun disisi lain tingginya harga tempat tinggal di kota memaksa masyarakat urban untuk mencari tempat tinggal dengan harga yang terjangkau dan tidak berada jauh dari tengah kota. Pinggiran sungai code merupakan tempat yang sangat strategis dan paling mudah diapati, apalagi dengan lokasinya yang tepat berada di pusat kota. Kemudian satu pesatu masyarakat berdatangan dengan segera membangun populasi masyarakat di bawah perkasanya jembatan Gondolayu. Dengan kondisi keuangan yang tidak memadai mereka membangun tempat tinggal seadanya yang sangat sederhana, berdinding triplek atau bahkan karton bekas sebagai benteng rumah mereka, rumah mereka pada saat itu sangat tidak layak untuk dihuni. Pemandangan pemukiman ini seakan meresahkan warga Yogyakarta sendiri, bahkan penghunjunya, karena pemukimanya yang sangat kumuh. Apalagi Pemukiman Code dikenal dengan Kawasan hitam, karena sangat rawan terjadi kekeresan, perampokan, penculika, dan Tindakan anarki lainnya. Hal ini menarik respon pemerintah untuk melakukan penataan dan penertiban Kawasan kali Code

Pada tahun 1980 Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan pernyataan ingin menghilangkan Kawasan pemukiman kumuh Code, dengan dalil bahwa Kawasan ini merupakan Kawasan dengan tingkat resiko bencana yang tinggi karena sewaktu-

waktu air sungai akan naik dan menghantam Kawasan ini, dan masyarakat yang menemati Kawasan code tidak memiliki dokumen kepemilikan resmi atas Kawasan yang mereka tempati. Sehingga pemerintah tidak memiliki pilihan lain selain menghilangkan pemukiman Code, dan masyarakat pada saat itu tidak memiliki alasan kuat untuk tetap bertahan. Namun pada akhirnya Seorang rohaniwan, seakan datang seperti seorang pahlawan dan menebarkan sisi kemanusianya, dia adalah seorang rohaniwan Katolik, yakni Romo Magunwijaya, Dia berdiri Bersama masyarakat, membela masyarakat pemukiman Code agar program pemerintah ini tidak dilaksanakan. Berbagai negosiasi dilakukan Romo Mangunwijaya dan pemerintah, hingga pada akhirnya Pemerintah menyetujui permintaan Romo dengan syarat Romo bersedia menata pemukiman Code.

Ditahun yang sama antara 1983 hingga 1986 merupakan titik awal perubahan pemukiman kumuh Code. Dengan latar belakang Pendidikan Arsiteknya, Romo Mangun mulai menata pemukiman kumuh code, dengan memakai anyaman bambu Romo mangun rumah masyarakat dengan pola yang saling berhadapan, agar silaturahmi antar penghuni selalu terawat. Sehingga terbentuk pola Rumah yang teratur dan sangat rapi, kemudian Romo Mangun memberi sentuhan warna pada pemukiman dengan berbagai warna yang beragam sebagai simbol masyarakat Code yang selalu Bahagia. Bukan hanya pada bangunan fisik saja, Romo Mangunwijaya juga menata masyarakatnya, menata kehidupan masyarakat, memberikan sosialisasi kerja kepada Masyarakat pemukiman Code. Sebagai bentuk kerja kreatif ini pemukiman code pun mulai Nampak berwajah bersih, nyaman dan aman, serta masyarakat yang terlatih untuk bekerja. Pemerintah pun ikut bangga dengan perubahan ini. Pemukiman code yang sebelumnya kumuh, tidak layak huni dan tidak tertata kini menjadi Kawasan yang sangat indah.

Pada tahun 1992, pemukiman Code mendapatkan penghargaan bergengsi berupa penghargaan *the Aga Khan*. Yang merupakan ajang penilaian arsitektur dunia dari Aga Khan IV, Jenewa Swiss. Yang sudah diberikan sejak tahun 1977. Hal ini merupakan keberhasilan pada masyarakat juga tangan pahlawan mereka Romo Mangunwijaya yang perlu diberikan Apresiasi yang sangat tinggi. Kini pemukiman Code masih eksis di jantung kota Yogyakarta.

2. Letak geografis dan batas Administratif

Kampung Code terletak di kelurahan Kotabaru, kecamatan Gondokusuman terletak di ledok Gondolayu, tepatnya dibawah jembatan Gondolayu. Dengan titik koordinat yang terbentang antara $110^{\circ}24'19$ sampai $110^{\circ}28'53$ bujur timur dan $07^{\circ}49'26$ lintang selatan. Lebih jelas kampung code berada di sepadan sungai Code, yang merupakan salah satu dari tiga besar aliran sungai di Kota Yogyakarta. Secara Administratif Kampung Code berada di lingkungan RT 01, RW 01 kelurahan Kotabaru. Luas wilayah kampung Code 6.548 m^2 wilayah ini bukan termaksud area diluar tanggul. Jumlah penduduk Kampung Code 224 jiwa. Pemukiman yang ada di kampung Code berada di sepadan sungai Code dan status kepemilikan lahanya merupakan illegal. Kampung Code berbatasan langsung dengan sungai Code disisi barat, kelurahan Terban di utara, Mc Donald Sudirman di sisi timur, dan Museum Sandi di Sisi selatan.

3. Sosial dan ekonomi masyarakat Kampung Code

Penduduk kampung Code berjumlah 224 jiwa dengan perincian 115 jiwa laki-laki dan 109 jiwa perempuan. Keadaan sosial masyarakat kampung Code terbilang cukup baik karena masyarakat kampung Code yang memiliki rasa senasib sebagai masyarakat miskin dan memiliki nilai kebersamaan melalui nilai sejarah keberadaan kampung yang sama. Sampai sekarang masyarakat masih hidup berdampingan dan bersatu

bersama. Dari segi ekonomi masyarakat Kampung Code yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai penggarap dan buruh, masyarakat kampung masih terbelang miskin.

4. Sarana dan prasarana

Kawasan permukiman Kampung Code memiliki fasilitas komunal seperti balai warga, masjid, area bermain anak, perpustakaan, museum Romo Mangun, pos kamling, ruang belajar mengaji, ruang terbuka sepanjang sempadan sungai. Namun, semua fasilitas tersebut masih kurang memenuhi standar sarana dan prasarana bagi sebuah kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Gerakan yang dikumandangkan masyarakat Kampung Code dan digawangi oleh Romo Y.B Mangunwijaya yang berhadapan dengan pemerintah Kota Yogyakarta merupakan salah satu Sejarah gerakan sosial yang menarik, Hak-hak Masyarakat dalam gerakan perjuangannya dapat di wujudkan. Dalam hal ini menentang dan mampu merombak kebijakan Pemerintah pada tahun 1983 dengan modal kekuatan sosial, kesamaan identitas, dan sedikit kekuatan politik. Masyarakat urban yang tergolong masyarakat miskin Kota menggulingkan kebijakan Pemerintah bersatu dalam satu tujuan yang sama tanpa menunggu inisiatif dari pemangku kekuasaan yang mendominasi kekuasaan dalam negara dan menindas kelas yang dibawahnya.

Dari keseluruhan analisi terkait Gerakan sosial dan perubahan kebijakan yang memangkukan objek studi pada masyarakat Kampung Code, Kelurahan Kota baru, Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, Rasionalitas pembuatan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta, dan masyarakat Kampung Code tergambar ketika Masyarakat Kampung Code dengan pemerintah kota Yogyakarta dikarena adanya perbedaan kepentingan. Pemerintah kota sebagai superordinasi mempunyai kepentingan dalam membangun wilayah perkotaan menjadi wilayah modern yang memiliki infrastruktur yang memadai, bersih dan tertata rapi, di lain pihak Masyarakat Kampung Code tergesur sebagai subordinasi memiliki kepentingan pemenuhan kebutuhan dasar terutama pangan, papan . Namun diluar dari pada itu pemerintah Kota Yogyakarta dalam pembuatan kebijakannya tidak sesuai dengan tahapan pedoman dan proses pembuatan kebijakan pada tahun 1983, Pemerintah tidak melibatkan

peran masyarakat aktif dalam proses pembuatan kebijakan pada tahun 1983. Dan hal ini tidak mengindahkan asas demokrasi di Indonesia. Seharusnya dalam pembuatan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta, setiap elemen harus di libatkan. Agar melahirkan kebijakan Pemerintah yang baik dan benar.

Kedua, taktik gerakan sosial Masyarakat Kampung Code ditandai dengan bagaimana Keterlibatan Langsung Romo Y.B Mangunwijaya dalam mendorong kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Pada Tahun 1983. Langkah-langkah yang dilakukan Romo Mangunwijaya yakni melakukan pertemuan dengan Menteri sosial dan Lingkungan Hidup yang pada saat itu dijabat Oleh Pak Emil Salim untuk membahas masa depan Kampung Code dan mengupayakan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta pada 1983 untuk tidak dilakukan, kemudian melakukan aksi mogok makan. Hingga pada akhirnya Pemerintah Kota Yogyakarta mengurungkan niatnya untuk melakukan penggusuran dan menyepati permintaan Romo bersama Masyarakat Kampung Code, dengan syarat agar pemukiman Kampung Code dilakukan Penataan. Kemudian gerakan yang kedua ditandai dengan adanya gerakan perubahan masyarakat dengan melakukan penataan pemukiman secara bergotong royong, melakukan pembinaan terhadap masyarakat Kampung Code, mengurus berkas-berkas administrasi masyarakat seperti KTP dan KK, dengan tujuan melegalkan keberadaan Kampung Code, dan melakukan pembinaan kerja terhadap masyarakat. Seperti melakukan kursus dan bina keterampilan masyarakat.

Ketiga, Gerakan Masyarakat Kampung Code yang digawangi Oleh Romo Y.B Mangunwijaya dilakukan untuk memenuhi kepentingan bersama, Karena didasari pada adanya persamaan pandangan dalam sebuah kelompok masyarakat yang sama kemudian diwujudkan dalam aksi gerakan sosial masyarakat. Adanya banyak alasan yang bisa diungkapkan mengapa seseorang bergabung dalam gerakan sosial dari sekedar keinginan nakal mencemooh otoritas hingga insting gerombolan yang tidak jelas tujuannya namun jika

ada alasan yang paling jelas mengapa orang terikat bersama dalam gerakan adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan pemegang otoritas atau para elit nilai dan kepentingan bersama merupakan basis dari tindakan-tindakan mereka. Gerakan sosial merupakan salah satu wadah sosial yang sukses menyuarakan ketimpangan sosial yang terjadi, menjadi alternatif dalam menyamapaikan ketidakpuasan terhadap aktor-aktor negara (birokrasi dan parlemen) melalui kebijakannya yang tidak berpihak kepada Masyarakat karena minimnya akses mekanisme dan jalur formal, bahkan di era sekarang yang masih mengedepankan kepentingan sendiri. Kampung Code dan Romo Mangun sebagai refleksi kepada kita bahwa dengan kekuatan kebersamaan dengan tujuan dan kepentingan bersama gerakan itu dapat menggulingkan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak manusiawi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran, yakni:

1. Rasionalitas

Diharapkan agar dalam pengambilan kebijakan pemerintah harus betul-betul memperhatikan kebutuhan masyarakat agar kebijakan yang dibuat tidak merugikan bahkan menindas masyarakat. Serta kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah dapat disamaratakan agar tidak terjadinya benturan dalam mempertahankan kepentingan serta perlunya memperhatikan ruang hak-hak masyarakat dalam perumusan kebijakan, agar kebijakan tentunya dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan itu kebijakan yang dibuat tidak mendapat penolakan dari masyarakat. kebijakan dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang baik dan benar dan megedepankan kepentingan masyarakat. Keberadaan Pemerintah dengan tugas dan Fungsi dalam mensejahterakan masyarakat serta meindungi masyarakat harus dijunjung tinggi, Pemerintah harus berani membela masyarakat, dalam memperjuangkan hak-haknya

2. Taktik Gerakan sosial

Gerakan sosial harus dijadikan wadah yang baik, dijadikan banteng kuat dalam menyuarakan ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Gerakan sosial harus dibekali kemampuan dan keberanian untuk memperjuangkan hak sosial serta dapat dipetakan langkah-langkah yang diambil, tujuannya agar Gerakan sosial yang dijalankan dapat sesuai dengan koridornya, agar tidak melenceng jauh dari harapan. Gerakan sosial bukan melalui aksi massa seperti halnya demonstrasi dan pemberontakan namun dengan kemampuan-kemampuan politik yang dimiliki dan menjadi kekuatan bersama dan tentunya tidak menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan.

3. Tujuan sosial

Gerakan sosial dilakukan harus mempunyai tujuan, serta mengarahkan kiblatnya pada apa yang ingin dicapai. Gerakan sosial bukan serta merta gerakan asal jadi, gerakan sosial harus mempunyai tujuan agar nantinya gerakan sosial dapat mencapai hasilnya dengan baik. Gerakan yang sering dilakukan belakangan ini di Indonesia terlihat sangat minim tujuan, terkadang antara satu sama lain tujuan dari gerakan yang berbeda. Gerakan sosial masyarakat Kapung Code menjadi refleksi bagi kita semua, bahwa gerakan sosial yang dilakukan atas dasar kesamaan tujuan mampu diwujudkan karena tidak tercerai berainya tujuan antara satu pihak dan pihak lainnya, dan mampu menghasilkan harapan yang sesuai dengan tujuan masyarakat.

4. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian tentang gerakan sosial dan perubahan kebijakan dalam pangkuan studi kasus masyarakat kampung Code, kelurahan Kotabaru, Yogyakarta masih terbuka untuk dilakukan pada tempat lain. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar mampu

menelaah tentang gerakan sosial dan perubahan kebijakan guna mencapai kebenaran yang semakin dalam dan memperkaya informasi yang disajikan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

- Agpalo, R. (1992). *modernization, development, and civilization; reflections on the the prospects of political systems in the first, second, and third worlds” in Kenneth E. Bouzon (ed.) Development and democratization in thr third world*. Washington: Taylor and Francis.
- Alexander, A. (1994). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pusat Jogja Mandiri.
- Andi, A. N. (2003). *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Charles Tilly dan Sidney Tarrow. 2015 *Contentious Politics edition*. Amerika: Press Universitas Oxford
- Desmita. (2012). *Psikolgi Perkembangan* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Faruk. (2014). *Pengantar sosiologi Sastra. edisi Revisi*. Yoyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gramsci, A. (Yogyakarta). *Prison Notebook: Catatan-catatan dari penjara (terj. Teguh Wahyu Utomo)*. 1987: Pustaka Pelajar.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mohammad, S. (2017). *Sosiologi dan perlawanan, Studi perlawanan Repertoar petani di Rengas Ogan Ilir, Sumatra Selatan*. Yogyakarta: Deepublish, CV. Budi Utama.
- Simon, R. (. (2004). *Gagasan-gagasan Politik Gramsci* . Yogyakarta: INSIST dan Pustaka Pelajar.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan teori gerakan sosial* . Malang: Intrans Publishing.
- Syamsudin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Penerbit Ombak
- Mohammad, Syawaludin. (2017). *Sosiologi dan perlawanan, Studi perlawanan Repertoar petani di Rengas Ogan Ilir, Sumatra Selatan*. Yogyakarta: Deepublish, CV. Budi Utama.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitaif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.
- J, M. L. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno Surakhmad. 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung, Tarsito.

Jurnal ;

- Afrizal Tjoerta, d. (2019). Sustainability of peacebuilding in aceh: An application of New Aceh Scenario Framework. *Opcion,Ario. vol 35 No 19*, 1815-1832.

- 'Amaliyah, N. (2019). Kekuasaan Dalam novel Sepohon kayu di tengah Gurun karya Harry D Mohan . *Kajian Hegemoni Antonio Gramsci* .
- Cahyono, T. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi korban penggusuran Bangunan di atas tanah pemerintah kota Surabaya (Study pada penghuni Rusunawa Keputih) . *Paradigma 9 (1)*.
- Cempaka Timur, d. (2018). Peran Community Resilience di Amerika Serikat dan Inggris dalam upaya kontra terorisme. *Jurnal Sospol, Vol.4, No 1*, 21-36.
- Connor, K. &. (2003). Development of a New Resilience Scale. *The Connor Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18*, 76-82.
- F.X Fajar, &. R. (2020). NEGARA VERSUS MASYARAKAT ADAT: Studi tentang Resistensi masyarakat adat Dhawe atas keputusan Pemerintah Kabupaten Nagekeo tentang alih fungsi lahan Mbay timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1 (1)*, 15-29.
- Kurniawati, P. (2018). Masyarakat dan Negara menurut Al-Farabi. *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-ilmu kesyariahan dan Pranata Sosial, 4 (1)*, 101-115.
- Leontopolou, S. (2010). An exploratory study of Altruism in greek children: relation with empathy, Resillience and classroom climate. *Psychology, Vol. 1, No 5*, 377.
- Manulu, Dimpos. "Gerakan Sosial Dan Perubahan Kebijakan Publik Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, Di Porsea, Sumatera Utara." *Populasi 18.1* (2016)
- Michelle, D. d. (2013). Investigation of the Relationship between Resillience, Mindfulness, and Academic self-Efficacy. *Open Journal of Social Sciences, Vol. 1 No. 6*, 1-4.
- Muhamad, S. (2019). Praktik Hegemoni Mahasiswa Senior terhadap junior di dalam lingkungan kampus. *Society, Vol. 7, No. 2*, 77-89.
- Muhtarom, A. (2020). *Pengorganisasian Kelompok Tani Oleh Serikat Tani Mandiri Dalam memperjuangkan Kepemilikan Tanah (Desa Bulupayung, Kec. Patimuan. Kab, Cilacap)*. Skripsi, IAIN.
- Nensilianti, L. L. (2019). Hegemoni kekuasaan dalam novel Negri diujung tanduk kara Tere Liye (pendekatan teori Hegemoni Antonio Gramsci). *Diss. FBS*.
- Pramaiswara, P., Wibisono, D., & Syah, P. (2022). GERAKAN SOSIAL BARU (STUDI TENTANG KONTRIBUSI BENUA LESTARI INDONESIA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA TANGERANG). *Jurnal Sociologie, 1(2)*, 196-217.
- Raisa, &. E. (2016). Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Resilience pada Narapidana dilembaga permasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang. *Jurnal empati. 5 (3)*, 537-542.
- Seftia, A. &. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap rumah liar di Baloi Kolam Kota Batam sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum . *Petita, Vol. 2 No. 1*, 38-49.
- Setyaningrum, R.A, dkk (2021) *Geostrategi Indoesia melalui pendekatan kesejahteraan dalam konsepsi ketahanan Nasional di bidang ekonomi*. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 1-11.

Wagnild, G. &. (1993). Development and psychometric evaluation of the Resilience Scale. *Journal Of Nursing Measurement, 1*, 165-178.

Yuliana, P. (2018). PEREMAJAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN MELALUI. *Jurnal HAM, Vol 9, No 1*.

sumber lain;

Asian Disaster Reduction Response Network. (2009) Terminologi pengurangan resiko bencana. Diakses pada Oktober 14 2022.

http://www.preventionweb.net/files/7817_isdrindonesia.pdf

UUD 1945 Pasal 33 ayat 4 tentang ekonomi Nasional

<https://doi.org/10.1002/da.10113>

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemerintah Kota Yogyakarta (Tata Pemerintahan Kota)

Nama :

Pekerjaan/jabatan :

Usia :

Pendidikan terakhir :

1. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah bapak bisa menjelaskan latar belakang dibentuknya kebijakan pemerintah kota Yogyakarta dalam melakukan Penertiban dan Penataan di Kali Code?
2. Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan Penertiban dan Penataan tersebut?
3. Dengan terlaksananya kebijakan Penertiban dan Penataan tersebut, apa tujuan yang ingin di capai?
4. Berapa jumlah rumah atau lapak kios yang akan dilakukan penertiban dan penataan?
5. Dalam pembentukan kebijakan menyangkut masalah Penertiban dan Penataan pemukiman, adakah pemerintah kota Yogyakarta melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan Penertiban dan Penataan di pemukiman mereka? Kapan Dan dimana sosialisasi itu dilakukan?
6. Dalam sosialisasi itu apa tawaran solusi yang di sepakati bersama masyarakat Kampung Code?
7. Apakah ada faktor pendukung dan penghambat di laksanakan implementasi kebijakan tersebut?
8. Apakah pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki SOP tertulis Penertiban dan Penataan? Bagaiman isi SOP tersebut?

B. Pemerintah Kelurahan

Nama :

Pekerjaan/jabatan :

Usia :

Pendidikan terakhir :

1. Bagaimana tanggapan pemerintah Kelurahan tentang adanya kebijakan Penertiban dan Penataan dari pemerintah kota Yogyakarta terhadap masyarakat di Kali code?
2. Bagaimana tanggapan pemerintah kelurahan melihat gejala social dalam bentuk gerakan social masyarakat Kampung Code dalam menentang kebijakan penggsuran di kali code?
3. Sejak kapan masalah Penertiban dan Penataan ini berlangsung?
4. Bagaimana tindakan pemerintah kelurahan mengatasi masalah tersebut?
5. Apakah pemerintah kelurahanmelakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan Penertiban dan Penataan itu?
6. apakah ada hambatan dalam melakukan sosialisasi? Seperti apa hambatanya?

C. Masyarakat Kampung Code

Nama :

Pekerjaan/jabatan :

Usia :

Pendidikan terakhir :

1. Sejak kapan bapak/ibu menetap atau tinggal di Kali Code?
2. Bagaimana reaksi Bapak/Ibu ketika mengetahui bahwa akan dilakukan Penertiban dan Penataan di Kali Code?
3. Seperti apa respon Bapak/Ibu ketika mengetahui akan ada Penertiban dan Penataan di Kali code?
4. Apa Faktor social-ekonomi yang sangat mempengaruhi Masyarakat Kampung Code jika Penertiban dan Penataan terus akan dilakukan?
5. Apakah sebelum melakukan Penertiban dan Penataan Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan Informasi bahwa akan dilakukan Penertiban dan Penataan?
6. Apakah ada komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kampung Code sebelum menerapkan Penertiban dan Penataan? Komunikasinya seperti apa? dan dalam melakukan komunikasi apakah ada masalah atau tidak?
7. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dalam melihat produk kebijakan Penertiban dan Penataan dari pemerintah?
8. Kebijakan bagaimana yang bapak/ibu harapkan dari pemerintah Kota Yogyakarta?

LAMPIRAN



(Foto: Depan Gapura sebagai pintu masuk menuju kampung Code 20/03/2023)



(Foto: penampakan kampung Code kampung Code diambil dari jembatan Gondolayu,
20/03/2023)



(Foto: Piagam penghargaan *Aga Khan Award* tahun 1992 yang dijadikan kenang-kenangan untuk masyarakat kapung Code, 20/03/2023)



(Foto: Balai kampung Code, sebagai tempat Umum yang dipakai untuk kegiatan sosial masyarakat, 20/03/2023)





(Foto: Bentuk Pemukiman Code yang dibangun Romo Mangun Tahun 1983, 20/03/2023)



(Foto: Museum dan Perpustakaan Romo Mangun di Kampung Code, 25/03/2023)



(Foto: Wawancara dengan Pak Watno, Sebagai masyarakat, sekaligus saksi sejarah gerakan sosial masyarakat Kampung Code, 25/03/2023)



(Foto: Wawancara dengan Ibu Mutiah, Ketua RT 01, RW 01 Kampung Code, , 25/03/2023)



(Foto: Wawancara dengan Pak Manyun, Masyarakat sekaligus saksi sejarah Gerakan Kampung Code tahun 1983, 25/03/2023)



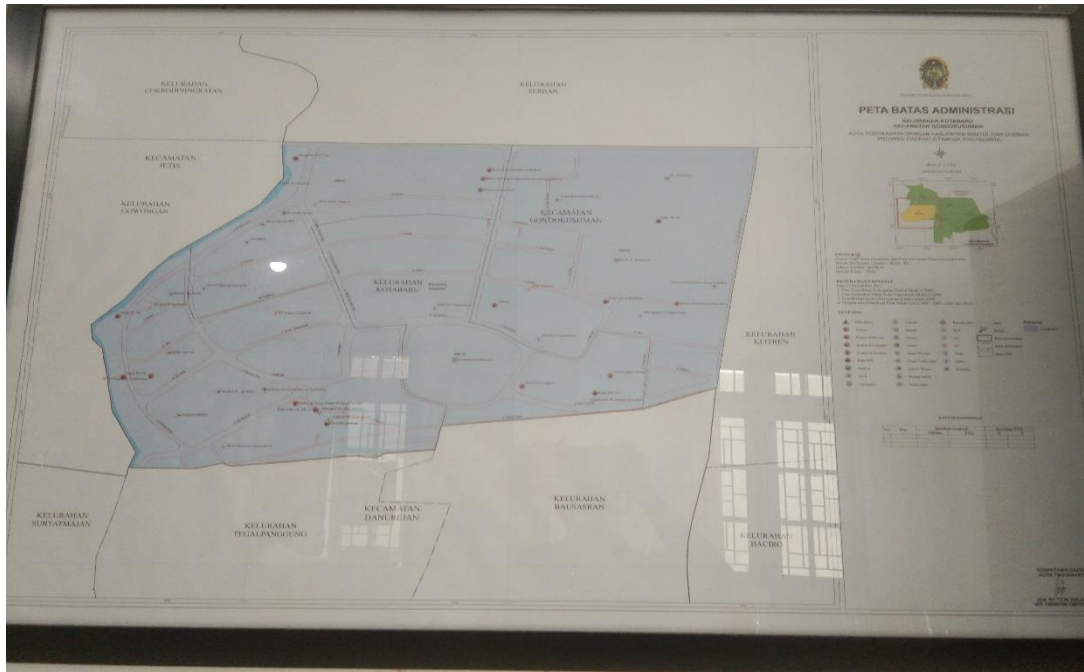
(Foto: Wawancara dengan Pak Darsono, Masyarakat sekaligus saksi sejarah Gerakan Kampung Code tahun 1983, 25/03/2023)



(Foto: Wawancara dengan Pak Bin, salah satu tokoh yang terlibat dalam gerakan sosial 1983, dan memiliki hubungan yang dekat dengan Romo Y.B Mangunwijaya 15/06/2023)



(Foto: Wawancara dengan Pak Urai Herman, Lurah Kelurahan Kotabaru, 27/03/2023)



(Foto: Peta Kelurahan Kotabaru, 27/03/2023)